

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI

DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Diajukan oleh :

MEISI RERUNG

4517013039



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
Nama Mahasiswa : Meisi Rerung
No. Stambuk : 4517013039
Program Studi : Akuntansi

Telaah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes


Thanwain, SE, M.Si


Mengetahui Dan Mengesahkan :

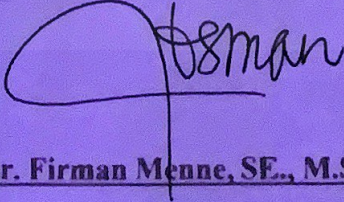
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi


Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH


Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MEISI RERUNG

Nim : 4517013039

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daea Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 8 Juli 2021



Meisi Rerung

**THE EFFECT OF REGIONAL TAX RECEIVING AND REGIONAL
RETRIBUTIONS ON REGIONAL ORIGINAL INCOME
TANA TORAJA DISTRICT**

By :

MEISI RERUNG

Department of Accounting Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

MEISI RERUNG. 2021. *thesis . The Effect of Regional Tax Revenue and Regional Levies on Regional Original Revenue of Tana Toraja Regency.*

Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes and Thanwain S.E, M.Si

The purpose of this study was to determine how influence local taxes and local levies have on local revenue (PAD) of Tana Toraja Regency..

The type of research conducted by the author is a quantitative approach.. The sample in this study is the report on the realization of PAD receipts in Tana Toraja Regency for the 2010-2020 period

The results showed that the regional tax and regional levies simultaneously had a significant effect on the local revenue (PAD) of Tana Toraja Regency by 91.4%. Partially, local taxes have a significant effect on local revenue (PAD) in Tana Toraja Regency. Meanwhile, the regional retribution does not show a significant effect on the local revenue (PAD) of Tana Toraja Regency

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA**

Oleh :

MEISI RERUNG

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

MEISI RERUNG.2021.Skripsi. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes dan Thanwain S.E, M.Si

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan kuantitatif.. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tana Toraja periode 2010-2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja sebesar 91,4%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan retribusi daerah tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, Hikmat dan PenyertaanNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANA TORAJA”**

Sehubungan dengan terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari semua pihak secara moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Manne, SE. M.Si., Ak. CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes dan Thanwain, SE, M.Si_ sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, Khususnya dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Meyer Dengen, SE. M.Si selaku Kepala Badan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Tana Toraja, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Beserta seluruh Pegawai terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sepanjang penelitian, khususnya Bapak Drs. Benyamin Turupadang, M.Si , Bapak Priadarma T. Buntugajang, SE. M.Si yang senantiasa memberikan arahan dan masukan.
7. Kepada kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
8. Kepada semua teman-teman dan sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan dukungan kepada penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.2 Pajak	13
2.2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	15
2.2.2 Fungsi Pajak Daerah.....	16
2.2.3 Tarif Pajak Daerah Kabupaten	16
2.3 Retribusi Daerah	18
2.3.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	19
2.4 Keterkaitan Antar Variabel.....	20
2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	20

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.5 Studi Empiris	21
2.6 Kerangka Pikir	23
2.1 Hipotesis	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Daerah Penelitian.....	25
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1 Jenis Data	26
3.1.1 Sumber Data	26
3.5 Metode Analisis Data	27
3.1 Defenisi Operasional	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Instansi	33
4.1.1 Sejarah Singkat Bapenda.....	33
4.1.2 Visi Misi Bapenda	34
4.1.3 Struktur Organisasi Bapenda.....	35
4.1.4 Uraian Tugas	36
4.2 Deskripsi Data	41
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.3.1 Analisis Deskriptif Data	41
4.3.2 Analisis Data	44
4.3.2.1 Uji Asumsi Klasik	44
4.3.2.2 Uji Hipotesis	51
4.4 Pembahasan Penelitian	54
BAB V PENUTUP	59
5.3 Kesimpulan	59
5.2 saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

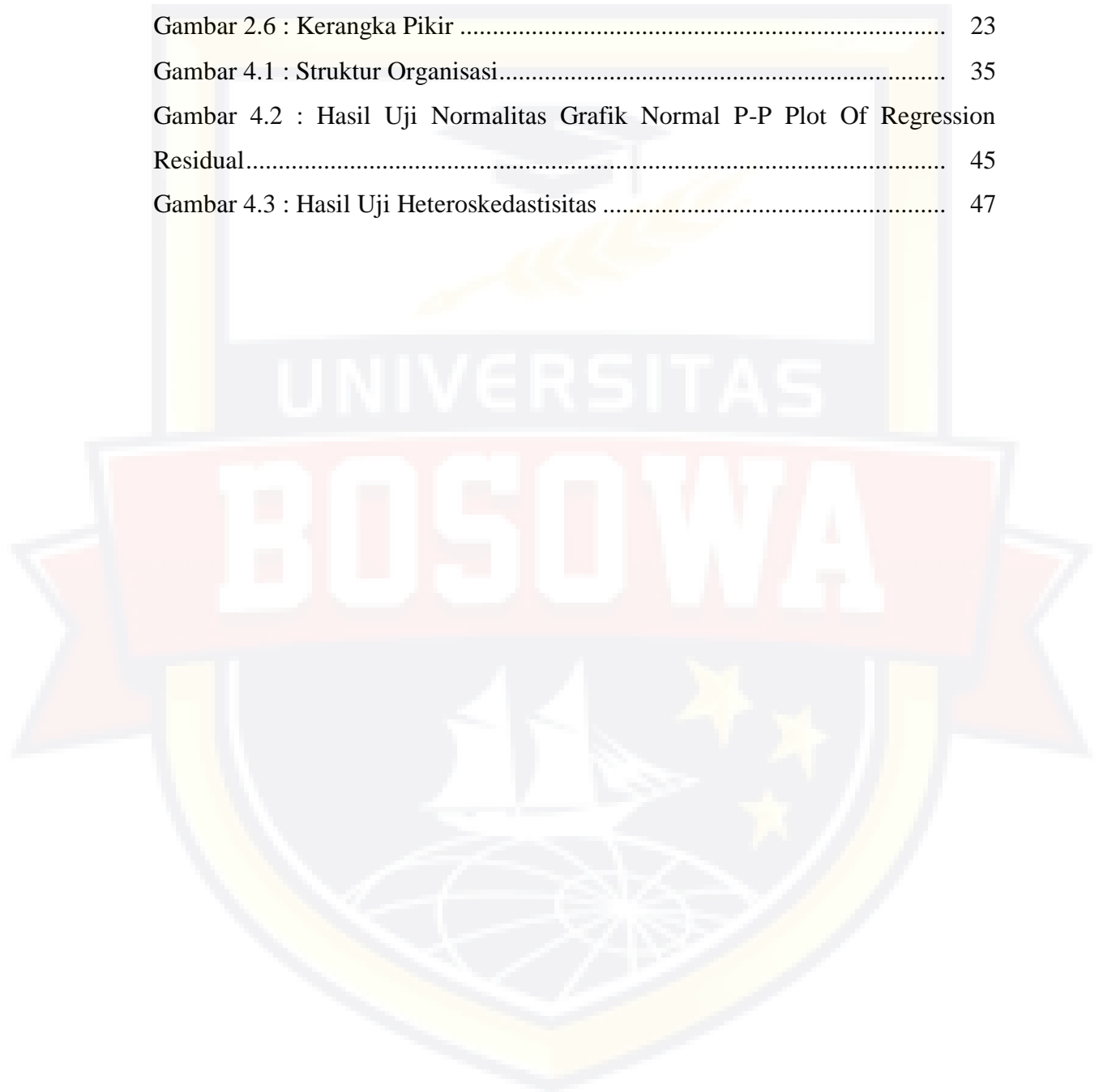


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2020.....	4
Tabel 1.2 : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2010-2020.....	5
Tabel 1.3 : Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2020.....	6
Tabel 4.1 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020	42
Tabel 4.2 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020.....	43
Tabel 4.3 : Rekapitulasi Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja periode 2010-2020	44
Tabel 4.4 : Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.5 : Hasil Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.6 : Hasil Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.7 : Rangkuman Hasil Analisis Linear Berganda.....	49
Tabel 4.8 : Hasil Uji T.....	51
Tabel 4.9 : Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.10 : Hasil Koefisien Determinasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 : Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	35
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Residual.....	45
Gambar 4.3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	47



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Uji Normalitas	65
Lampiran 2 : Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Residual.....	65
Lampiran 3 : Hasil Uji Multikolinieritas	66
Lampiran 4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Lampiran 5 : Hasil Uji Autokorelasi.....	67
Lampiran 6 : Rangkuman Hasil Analisis Linear Berganda	67
Lampiran 7 : Hasil Uji T	68
Lampiran 8 : Hasil Uji F	69
Lampiran 9 : Hasil Koefisien Determinasi	69
Lampiran 10 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2010	70
Lampiran 11 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2011	71
Lampiran 12 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2012	72
Lampiran 13 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2013	73
Lampiran 14 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2014	74
Lampiran 15 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2015	75
Lampiran 16 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2016	76
Lampiran 17 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2017	77
Lampiran 18 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2018	78
Lampiran 19 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2019	79
Lampiran 20 : LRA Pendapatan dan Belanja Tahun 2020	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia digolongkan pada kategori negara berkembang berdasarkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kategori menengah namun potensi sumber daya berlimpah yang dapat meningkatkan status Indonesia menjadi negara maju. Indonesia sayangnya belum mampu memanfaatkan dengan baik potensi yang tersedia tersebut. Salah satu aspek yang menjadi permasalahan Indonesia yang hingga kini sedang dihadapinya ialah pada sektor ekonomi.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penerimaan negara dari sumber perpajakan diharapkan menjadi cara yang efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pajak merupakan sumbangan yang diwajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk disetorkan kepada Negara tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa diatur dalam perundang-undangan dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Pajak sangat berperan penting untuk negara, karena dalam melaksanakan pembangunan negara pajaklah yang merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki porsi yang besar untuk membiayai semua pengeluaran belanja negara.

Dalam mewujudkan otonomi daerah, diperlukan kemampuan dengan adanya upaya-upaya yang konkret dalam proses memajukan keuangan daerah otonom, seperti bagaimana cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting bagi suatu daerah agar bisa

disebut sebagai penyelenggara otonomi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perolehan sumber PAD lainnya berdasarkan Undang-Undang dan Aturan Pemerintah yang berlaku dengan memperhatikan keadaan dari daerah tersebut termasuk potensi ekonominya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dan PP No.58 Tahun 2005 pasal 22, yang membahas tentang perimbangan keuangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Anggoro (2017:18) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapatkan pemerintah daerah melalui pengaktualan kegiatan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang dipegang oleh pemerintah daerah

Dalam membiayai sendiri kebutuhan masyarakat maka peningkatan PAD perlu dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Agar daerah tersebut tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pereolehan pemungutan retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang sudah termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, juga merupakan pendapatan daerah berdasarkan aturan yang

berlaku. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar peranannya dalam pendapatan daerah maka itu adalah bukti bahwa keberhasilan upaya-upaya atau tingkat kemampuan suatu daerah didalam dapat memenuhi keperluan masyarakat daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pondasi utama dalam membiayai pengeluaran daerah, sehingga dalam menentukan perkembangan pendapatan dan pembangunan daerah tersebut maka dapat diperhatikan dari mampu atau tidaknya daerah tersebut menggali potensi PAD.

Suatu daerah dapat diketahui kemampuannya dalam mengelolah dan mengurus kebutuhannya sendiri dapat dilihat dari PAD yang meningkat berupa retribusi daerah, pajak daerah dan penerimaan daerah lainnya yang menjadi sumber biaya dalam usaha memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. PAD yang rendah menggambarkan daerah tersebut memiliki kemandirian yang rendah sehingga masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan didaerah tersebut.

Tana Toraja merupakan daerah kabupaten yang terkenal dengan berbagai jenis objek wisatanya, sehingga bisa dikatakan menjadi salah satu tujuan wisatawan domestic maupun wisatawan asing. Dengan dikenalnya sebagai tempat dengan berbagai macam objek wisata, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan PAD dengan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada, utamanya dari pajak dan retribusi daerah menjadi faktor vital dalam pembiayaan pemerintah daerah.

Akan tetapi pada beberapa data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa PAD yang diharapkan penerimaannya dapat meningkat seiring dengan perkembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu destinasi wisata tidak mencapai target.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Periode 2010-2020

Tahun	PAD	
	Anggaran	Realisasi
2010	26.243.939.544,00	20.283.615.778,05
2011	27.346.615.417,00	19.686.833.802,76
2012	29.687.414.140,00	31.720.677.572,15
2013	36.471.129.208,00	38.776.667.265,57
2014	67.247.878.957,18	82.506.082.709,11
2015	69.458.314.821,00	79.195.391.761,15
2016	93.231.216.000,00	101.993.901.924,06
2017	150.563.647.813,00	92.386.607.533,21
2018	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94
2019	187.752.107.000,00	119.464.168.341,55
2020	125.559.974.000,00	102.397.096.654,18

Sumber Data : BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

Dari data yang diperoleh di BAPENDA diatas, dapat diketahui data realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tana Toraja berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 dengan jumlah sebesar 19.686.833.802,76 namun mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2012 melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tana Toraja dalam beberapa tahun masih belum memenuhi target yang dianggarkan.

Bersamaan menurunnya penerimaan PAD Kabupaten Tana Toraja tersebut, penulis mendapatkan data yang memperlihatkan tingkat pajak dan

retribusi di daerah tersebut sebagai sumber penerimaan yang kontribusinya dapat optimal ternyata juga mengalami fluktuasi dan realisasinya masih terdapat target anggaran yang belum tercapai.

TABEL 1.2
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Tana Toraja Periode 2010-2020

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	PAD	Kontirbusi pajak daerah terhadap PAD
2010	2.091.100.000,00	1.811.302.161,00	20.283.615.778,05	8,92%
2011	2.141.100.000,00	2.356.018.513,00	19.686.833.802,76	11,96%
2012	2.348.050.000,00	3.736.529.606,00	31.720.677.572,15	11,77%
2013	2.398.050.000,00	3.882.204.835,00	38.776.667.265,57	10,01%
2014	5.057.372.000,00	6.516.318.116,29	82.506.082.709,11	7,89%
2015	4.980.454.000,00	7.391.259.988,50	79.195.391.761,15	9,33%
2016	6.658.815.000,00	7.336.005.010,00	101.993.901.924,06	7,19%
2017	10.500.000.000,00	9.211.461.706,70	92.386.607.533,21	9,97%
2018	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00	106.108.442.618,94	8,75%
2019	13.000.000.000,00	12.366.450.845,00	119.464.168.341,55	10,35%
2020	11.000.000.000,00	10.977.830.368,50	102.397.096.654,18	10,72%

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

Tabel 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan walaupun persentase kontribusinya terhadap PAD masih berfluktuasi dan terdapat penurunan. akan tetapi pada tahun 2010 pajak yang pendapatannya paling sedikit yaitu sebesar 1.811.302.161,00 , sedangkan yang memiliki pendapatan paling tinggi adalah tahun 2019 yaitu sebesar 12.366.450.845,00 daerah dan juga target realisasinya sudah mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun persentase retribusi daerah PAD Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Tana Toraja Periode 2010-2020

Tahun	Anggaran Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
2010	20.272.312.544,00	13.486.190.040,00	20.283.615.778,05	66,48%
2011	20.454.598.000,00	11.575.395.784,75	19.686.833.802,76	58,79%
2012	20.176.813.000,00	22.338.063.489,69	31.720.677.572,15	70,42%
2013	27.571.924.734,00	27.834.717.233,30	38.776.667.265,57	71,78%
2014	45.475.887.989,00	59.960.987.370,61	82.506.082.709,11	72,67%
2015	50.381.825.600,00	48.780.154.003,50	79.195.391.761,15	61,59%
2016	6.453.770.000,00	5.619.200.900,00	101.993.901.924,06	5,50%
2017	9.750.000.000,00	7.742.272.692,00	92.386.607.533,21	8,38%
2018	18.250.000.000,00	10.418.281.371,00	106.108.442.618,94	9,81%
2019	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00	119.464.168.341,55	10,71%
2020	10.000.000.000,00	6.330.466.753,75	102.397.096.654,18	6,18%

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

Tabel 1.3 menunjukkan realisasi penerimaan retribusi daerah berfluktuasi di tahun 2011, 2016, 2017 dan 2020 dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan sehingga menyebabkan penurunan presentase pada kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan PAD, dan juga sesuai data diatas realisasi penerimaan retribusi di beberapa tahun target yang dianggarkan tidak terpenuhi.

Dalam menjalankan otonomi daerah, masyarakat berperan penting pada pembayaran pajak dan retribusi daerah. Retribusi dan pajak merupakan sumber penerimaan daerah untuk mencapai target PAD yang digunakan untuk biaya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kendala yang sering dihadapi oleh banyak daerah dalam kaitannya mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian penting PAD, adalah belum

maksimalnya kontribusi pada penerimaan daerah yang menyeluruh disebabkan rendahnya tingkat penerimaan serta target anggaran yang belum tercapai.

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang setimpal secara paksa sesuai aturan yang berlaku dan berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kesit Bambang Prakosa, 2005:2). Retribusi daerah ialah pungutan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui pelayanan jasa serta pemanfaatan fasilitas umum yang telah disediakan bagi kepentingan masyarakat, berdasarkan dengan kepentingan daerah yang berlaku (Indra Bastian., 2007:156).

Secara umum pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yakni Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga bentuk sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Umum,

Berdasarkan uraian dan data yang telah disajikan maka ciri utama mempunyai suatu daerah terlihat pada kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari segi penerimaan atau pembiayaan, berarti daerah otonomi berkewenangan dan mampu menggali sumber pendapatan sendiri.

Penelitian yang dilaksanakan berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini berfokus pada sektor PAD yang bersumber pada retribusi dan pajak daerah, karena kedua sumber ini merupakan kendala yang sering dihadapi pada implementasi pemerintahan. Studi empiris penelitian dilaksanakan di kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh pajak dan retribusi pada kinerja keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja didasarkan penjelasan latar belakang perbedaan hasil penelitian –sebelumnya, sehingga Penulis pun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diperoleh berdasarkan informasi yang disajikan dalam latar belakang sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
2. Apakah retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji tingkat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
2. Untuk mengetahui dan menguji tingkat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis pribadi diharapkan untuk dapat memperoleh ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembaca yang melakukan penelitian yang berkaitan tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dipungut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Anggoro (2017;18), menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber, yaitu dari pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan beberapa lain-lain pendapatan asli yang sah untuk menggali pendanaan dalam proses melaksanakan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan sumber-sumber keuangan suatu daerah, dimana sumber keuangan tersebut berasal dari berbagai macam potensi yang ada didaerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada suatu daerah untuk mengelolah dan menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerahnya yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka dalam memaksimalkan PAD memiliki pengertian bahwa kewenangan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD guna untuk mampu menggali sumber-sumber penerimaan baru.

Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Siahaan,2010) :

1. Intensifikasi, melalui upaya :
 - a. Pencatatan dan reaktulisasi objek pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada
 - c. Memulihkan sarana dan prasarana pungutan yang tidak memadai
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (perluasan).
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 dapat kita lihat bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Dimana pajak merupakan sumber-sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah selain retribusi daerah

2. Retribusi Daerah

Penerimaan Pusat kembali mengeluarkan peraturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Melalui berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya

berbagai sumber-sumber penerimaan yang baru, akan tetapi disisi lain beberapa sumber beberapa Pendapatan Asli Daerah yang harus dihapuskan karena daerah tidak boleh melakukan pemungutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan jenis retribusi ada 3, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan bantuan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan serta kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh individu atau badan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah selaku pembayaran atas pemberian izin yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah guna untuk kepentingan individu atau badan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah merupakan objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN serta bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang asalnya dari lain lain-lain pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengelompokkan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan merupakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- e. Potongan, komisi, atau apapun bentuk lain sebagai akibat dari adanya penjualan, penyediaan barang ataupun jasa oleh pemerintah

2.2 Pajak

“Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang daerah memiliki batas-batas wilayah yang berhak mengelola dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut gagasan sendiri berdasarkan harapan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Mardiasmo 2011:12). Pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah dimana hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan akan tetapi implementasinya bisa dipaksakan. Berlandaskan kewenangan di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana “Pajak Daerah adalah merupakan pajak-pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten atau kota) yang dikelola berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya dipakai untuk pembiayaan daerahnya” (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Adapun setiap jenis pajak daerah memiliki, objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri. Selain itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota bisa mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak. Dimana dampaknya bagi daerah itu adalah jenis atau tarif pajak yang dipungut bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut sifatnya dapat dipaksakan yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak yang dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah *public investment*
4. Pajak lebih diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya terdapat surplus, maka akan dipergukana untuk membiayai
5. Selain mempunyai tujuan sebagai *budgeter*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu mengatur

Dengan adanya ciri-ciri tersebut maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dimana hasilnya dipakai untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya, tanpa ada imbalan secara langsung.

2.2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:77), Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten / kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

2.2.2 Fungsi pajak daerah

Fungsi pajak daerah pada umumnya lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, selain fungsi

regulasi untuk pengendalian. Dengan hal tersebut, maka fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan Fungsi *regulatory*.

1. Fungsi Penerimaan (*budgetory*)

Fungsi *budgetair* dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk beragam kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, Fungsi ini merupakan yang paling utama untuk mengisi kas daerah.

2. Fungsi pengaturan (*regulerend*)

Mengatur atau *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrument untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang atau jasa tertentu.

2.2.3 Tarif Pajak Daerah Kabupaten

Tarif pajak daerah kabupaten/ Kota berdasarkan undang – undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar :

1. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) sedangkan untuk pajak rumah kos sebesar 5%
2. Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10%
3. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%
4. Pajak Reklame Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% , sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5%
6. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15%
7. Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau

bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, ditetapkan sebesar 2,5% .

9. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%

2.3 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan. Menurut Marihot (2016:161) “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan”.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi daerah menurut (Marihot.P.Siahaan, 2005:7), antara lain yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis,

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

6. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2.3.1 Jenis-jenis retribusi daerah

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan menurut Windhu (2018: 186-191), yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh individu atau badan .
2. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kab.

Tana Toraja

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny, 2012). Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti Pajak Hotel, Hiburan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber kekuatan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. Dimana setiap adanya peningkatan dalam penerimaan pajak daerah maka juga akan mempengaruhi peningkatan PAD. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu apabila jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Tana Toraja

Menurut Siahaan (2005) “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah kota/kabupaten, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan atau kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan.

2.5 Studi Empiris

1. Putri (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Cirebon. Dari hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa dengan melakukan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD dan retribusi daerah juga berpengaruh secara parsial terhadap PAD. Sedangkan didalam penelitian saya yang menjadi variabel x adalah pajak daerah dan retribusi

daerah, dan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja

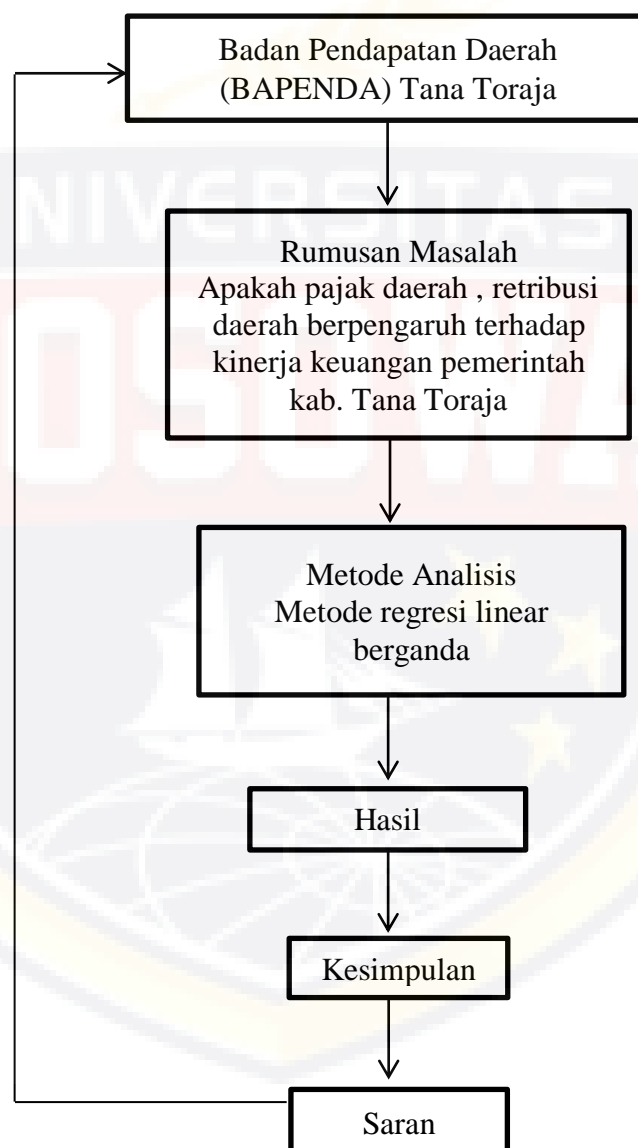
2. Rukmana (2013) meneliti tentang Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Yang menjadi variabel x dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara sama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PAD, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dalam penelitian saya yang merupakan variabel x adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja
3. Fitra (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Padang setelah diterapkannya UU Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara signifikan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pengujian secara parsial juga menunjukkan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan dalam

penelitian saya yang menjadi variabel x adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja

2.6 Kerangka Pikir

Gambar 2.6

Kerangka Pikir



2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara, dimana dugaan ini masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

H_{01} : Diduga pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H_{a2} : Diduga pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Retribusi Daerah

H_{02} : Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H_{a2} : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

3. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

H_{03} : Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_{03} : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli D

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Tana Toraja, pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Bombongan, Makale, Kabupaten Tana Toraja

3.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung ketempat penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dalam bentuk dokumen berupa Laporan Pendapatan Realisasi PAD.
2. Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tana Toraja.

3.4 Jenis dan Sumber data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak dapat diukur dalam skala angka, dan data ini disajikan secara deskriptif (Kuncoro 2014:2015), dimana data yang diperoleh berupa informasi yang terkait dengan Struktur Organisasi.

b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur dalam skala angka, dan data-datanya dapat disajikan dalam bentuk angka-angka (Kuncoro 2014:2015). Berdasarkan sifat, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka, yang dapat dilihat dari laporan data di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja

3.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Tana Toraja

b. Data Sekunder

Berdasarkan cara memperolehnya, maka penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data ini dapat diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang sumber data penelitiannya diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X_1), dan retribusi daerah (X_2), terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y). maka dapat diturunkan persamaan fungsi sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α_0 : Konstanta

X_1 : Pajak Daerah

X_2 : Retribusi Daerah

β_{123} : Koefesien regresi

ε : Error Term

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi linear berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi terlebih dahulu. Iman Ghozali (2011),

menjelaskan bahwa uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi linear berganda untuk mengetahui apakah model regresi baik atau tidak. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi konsisten dan tidak biasa

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak normal. Menurut Ghozali (2011), untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan dasar keputusannya berdasarkan probabilitas (*asymptotic significance*) yaitu apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data disimpulkan data tersebut berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lain dalam model regresi saling berkorelasi linear. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor (VIF)* masing-masing variabel independen. Apabila $VIF > 10$, maka variabel independen memiliki multikolinearitas dengan variabel lainnya, sedangkan apabila $VIF < 10$ maka dapat disimpulkan variabel independen tidak memiliki persoalan multikolinearitas (Ghozali, 2011).

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Priyatno (2014:113). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di standardized. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterodastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heterokedastisitas. H_0 = tidak ada heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara data dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat variabel pengganggu

masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode *Durbin-Watson*.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui keakuratan data atau tingkat signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Uji hipotesis diantaranya adalah uji parsial (Uji-t), uji simultan (Uji -f), dan koefisien determinasi (Uji- R^2)

a. Uji Parsial (Uji t-statistik)

Uji t bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan juga untuk melihat tingkat signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Menurut Suharyadi dan Purwantu (2014) Uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Kriteria pengambilan keputusan uji t yaitu :

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen

b. Uji Simultan (Uji F-statistik)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada uji F menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan uji F dilakukan dengan membandingkan

signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika semakin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

3.6 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah pernyataan yang memuat batasan tentang pengertian dari teori-teori atau variable-variabel operasional yang diperlukan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam penelitian tersebut.

1. Pajak Daerah (X1) Pajak daerah adalah Iuran wajib pajak yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dimana iuran ini wajib dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Retribusi Daerah (X2) Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Daerah untuk ting

kat Provinsi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, dimana retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau Badan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

Badan Pendapatan Daerah atau lebih dikenal dengan sebutan BAPENDA masalah lembaga pemerintah yang menjadi penunjang dalam urusan pemerintahan daerah disektor keuangan atau pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Pimpinan Bapenda yakni Kepala Badan mempunyai tanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Bapenda sebagaimana dimaksud memiliki tugas mendukung dan membantu Bupati dalam menunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan yang merupakan hak dalam mengelola bidang tersebut. Badan Pendapatan Daerah juga mempunyai tugas penyusunan kebijakan strategis terkait pemantauan keuangan, pelaporan kegiatan tugas, evaluasi keuangan, dan melaksanakan tugas yang mendukung penuh baik teknis maupun non teknis dalam bidang pendapatan daerah.

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah

Paradigma pemerintahan menjadi Desentralisasi dari Sentralisasi yang diidentifikasi melalui pemberian kebijakan otonom agar daerah secara nyata dan bertanggung jawab juga harus didukung oleh pembiayaan dengan sumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sehingga Pemda Kabupaten Tana Toraja menentukan kebijakan serta langkah dengan menerbitkan Perda No. 10 Th. 2016 tentang Pemberntukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. selanjutnya Perbup No. 41 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati

Tana Toraja No. 60 Tahun 2016 tentang Struktur, Kedudukan, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

VISI : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel”

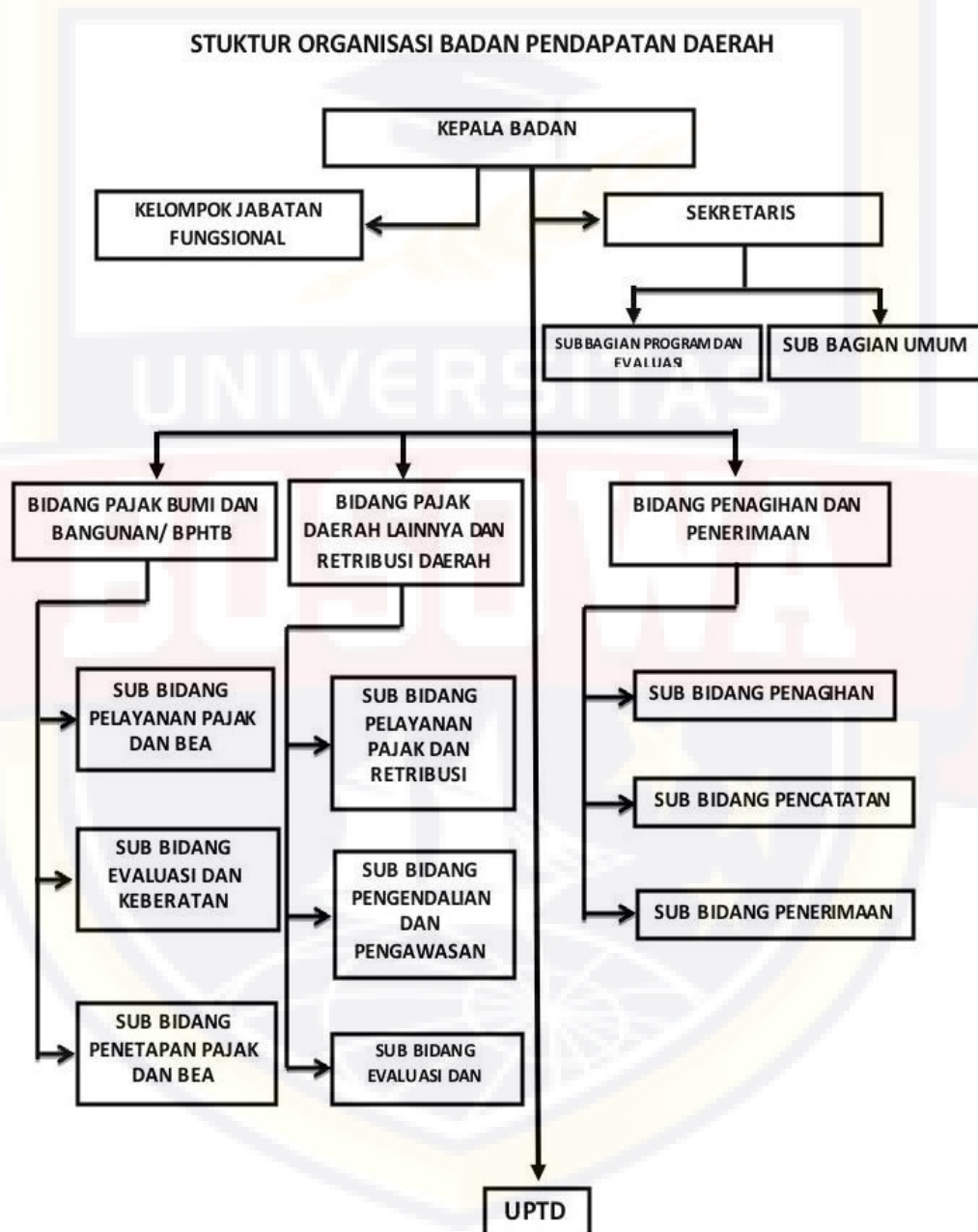
MISI : Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah (Kab. Tana Toraja, ditentukan misi berupa:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
4. Mengembangkan dan mengelola Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
7. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Meningkatkan kualitas kinerja dalam mengalokasikan belanja daerah secara efektif, transparan, efisien berdasarkan urutan prioritas.
9. Menyediakan akses konsultasi dan mengupayakan perbaikan pendapatan yang sebagai sumber penerimaan daerah.
10. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



4.1.4 Uraian Tugas

Setiap bagian organisasi Kantor Bapenda Kab. Tana Toraja mempunyai fungsi serta tugas yang bervariasi. Ada pula tugas setiap bagian tersebut yakni:

1. Kepala Badan

- 1) Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas.
- 2) Membentuk program kerja serta rencana selaku acuan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun rancangan, mengoreksi, menandatangani naskah dinas serta menghadiri rapat yang diadakan.
- 4) Mengoordinasikan kegiatan badan baik teknis maupun administrasi ke Bupati, DPRD, dan intalasi teknis terkait.

2. Sekertariat

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekertariat selaku acuan pada pelaksanaan tugas
- 2) Mengawasi, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pada lingkup sekertariat guna melihat perkembangan dari pelaksanaan tugas
- 3) Berpartisipasi pada rapat sejalan pada bidang tugas
- 4) Menyusun rancangan mengoreksi, serta menandatangani naskah dinas

Sekertariat dibawahnya terdapat 2 subbagian:

a. Sub bagian umum

- a) Membentuk perencanaan aktivitas subbagian umum serta kepegawaian selaku acuan pada pelaksanaan tugas

b) Mengawasi, memantau, serta menilai pelaksanaan tugas pada lingkungan bagian umum serta kepegawaian guna melihat peningkatan kualitas tugas yang dilaksanakan

c) Mendistribusi pemberian petunjuk pelaksanaan tugas supaya berlangsung lancar

d) Memfasilitasi serta mengoordinasikan administrasi surat perjalanan serta tugas dinas pegawai

e) Membentuk perancangan, mengoreksi, serta menandatangani naskah dinas

a. Subbagian Evaluasi dan Program

a) Membentuk perencanaan aktivitas subbagian evaluasi serta program selaku acuan pada pelaksanaan tugas.

b) Mengumpulkan serta menyajikan informasi serta data perencanaan program maupun aktivitas badan.

c) Mendistribusi pemberian petunjuk pada staf sehingga pelaksanaan tugas berlangsung dengan lancar.

d) Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan program dalam lingkup badan.

e) Mempersiapkan bahan, memantau, serta mengevaluasi kinerja.

3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BTHTB

Kepala bidang memiliki tugas:

1) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan serta penentuan PBB-P2 serta BPHTB.

- 2) Pelaksanaan daftar induk wajib pajak, melaksanakan penghimpunan serta pengelolaan data subjek maupun objek PBB-P2 serta BPHTB.
- 3) Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib PBB-P2 serta BPHTB.
- 4) Perhitungan serta penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- 5) Melaksanakan, mendistribusikan, serta menyimpan surat perpajakan yang berhubungan pada pendaftaran, pendataan, juga penentuan PBB-P2 serta BPHTB.

Bidang pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan bidang PBB-P2 serta BPHTB selaku acuan pada pelaksanaan tugas
- 2) Melaksanakan pendistribusian serta memberikan pedoman pelaksanaan tugas hingga berlangsung lancar
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan sejalan pada bidang tugas.

Sub bidang pelayanan pajak dan bea diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data terkait pendataan dan pelayanan PBB-P2 serta BPHTB.

Sub bidang penetapan pajak dan bea diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data penentuan pajak dan bea data yang berkaitan

pada PBB-P2 serta BPHTB.

Sub bidang evaluasi dan keberatan diketuai kepala sub bidang yang bertugas membantu serta menyokong pelaksanaan tugas kepala bidang PBB-P2 serta BPHTB untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data terkait pelaporan juga penanganan masalah PBB-P2 serta BPHTB.

4. Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

Tugas kepala bidang ialah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perpajakan daerah serta retribusi daerah;
- 2) Melaksanakan kebijakan perpajakan daerah yang telah dibuat serta retribusi daerah;
- 3) Memantau serta pembinaan pada para sub bidang di bawahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas dinas lain yang atasan berikan.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tugas:

- 6) Mengolah data subjek serta objek pajak (diluar BPHTB maupun PBB), juga retribusi melalui surat ketetapan pajak dan pemeriksaan lapangan/lokasi atas tembusan surat dinas dari instansi daerah
- 7) Menyimpan surat retribusi serta perpajakan daerah yang berhubungan pada pendataan
- 8) Melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang kepala dinas berikan pada tugas pokok

Sub bidang pelayanan pajak dan retribusi diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang pajak daerah lainnya serta retribusi daerah untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

Sub bidang pengendalian dan pengawasan diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data dan bahan.

Sub bidang evaluasi dan keberatan diketuai kepala sub bidang yang bertugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data.

5. Bidang Penagihan dan Penerimaan

Fungsi dari Kepala bidang meliputi:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penagihan serta penerimaan;
- 2) Melaksanakan administrasi bidang penagihan serta penerimaan
- 3) Mengumpulkan data yang mendukung pendapatan selain pajak dan retribusi daerah agar memaksimalkan potensi daerah
- 4) Melaksanakan penagihan pajak serta retribusi daerah sejalan pada aturan.

Bidang Penagihan dan Penerimaan memiliki tugas:

- 1) Merencanakan aktivitas bidang penagihan serta penerimaan selaku acuan pada pelaksanaan tugas
- 2) Merancang, memeriksa, memberikan paraf dan atau tandatangan naskah dinas

- 3) Menagih retribusi serta pajak daerah sejalan pada aturan guna mencukupi target penerimaan
- 4) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang atasan perintahkan sejalan pada bidangnya.

Sub bidang penagihan diketuai kepala sub bidang yang tugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan data bahan penagihan pendapatan serta penerimaan pembiayaan.

Sub bidang penerimaan diketuai kepala sub bidang dengan tugas menyokong kepala bidang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, serta persiapan pengumpulan bahan maupun data penerimaan.

4.2 Deskripsi Data

Berdasarkan Rumuan Masalah maka penelitian ini termasuk kedalam golongan penelitian kausatif. Dimana penelitian Kausatif Merupakan Penelitian yang digunakan untuk dilakukan analisa agar diketahui variabel tidak terikat dan variabel yang terikat terikat saling berpengaruh atau tidak didalam penelitian ini akan membahas mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kab. Tana Toraja.

4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Deskriptif Data

Realisasi dan Target penerimaan dari sector perpajakan daerah di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan selama periode 2010-2020. Jika penerimaa terhadap PAD tinggi, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dinggap berhasil untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun sebaliknya,

apabila PAD yang diperoleh oleh pemerintah angkanya makin menurun atau jumlah yang sedikit, maka dapat dikatakan bahwa otonomi daerah yang diselenggarakan belum maksimal. Untuk melihat seberapa besar penerimaan daerah yang berasal dari Pajak, data yang diambil dari tahun 2010-2020 dapat kita lihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja periode 2010-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI
2010	2.091.100.000,00	1.811.302.161,00
2011	2.141.100.000,00	2.356.018.513,00
2012	2.348.050.000,00	3.736.529.606,00
2013	2.398.050.000,00	3.882.204.835,00
2014	5.057.372.000,00	6.516.318.116,29
2015	4.980.454.000,00	7.391.259.988,50
2016	6.658.815.000,00	7.336.005.010,00
2017	10.500.000.000,00	9.211.461.706,70
2018	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00
2019	13.000.000.000,00	12.366.450.845,00
2020	11.000.000.000,00	10.977.830.368,50

Sumber data: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

Dari data diatas diketahui bahwa rekapitulasi dan hasil realisasi pendapatan pajak daerah Kab. Tana Toraja dengan periode 2010-2020 mengalami peningkatan. Hal tersebut berbeda dengan penerimaan retribusi daerah dengan periode waktu 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 2010-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI
2010	20.272.312.544,00	13.486.190.040,00
2011	20.454.598.000,00	11.575.395.784,75
2012	20.176.813.000,00	22.338.063.489,69
2013	27.571.924.734,00	27.834.717.233,30
2014	45.475.887.989,00	59.960.987.370,61
2015	50.381.825.600,00	48.780.154.003,50
2016	6.453.770.000,00	5.619.200.900,00
2017	9.750.000.000,00	7.742.272.692,00
2018	18.250.000.000,00	10.418.281.371,00
2019	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00
2020	10.000.000.000,00	6.330.466.753,75

Sumber data: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

Dari data rekapitulasi dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja diatas menunjukkan data penerimaan yang bersumber dari retribusi berfluktuasi dan pada tahun 2011, 2016, 2017 dan 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pendapatan dari retribusi dalam beberapa tahun terdapat tahun yang belum mencapai anggaran atau target yang ditentukan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja. Sama halnya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan sehingga menyebabkan target tidak terpenuhi. Berikut ini merupakan rekapitulasi dan realisasi penerimaan PAD Kab. Tana Toraja Periode 2010-2020 :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Tana Toraja periode 2010-2020

Tahun	PAD	
	Anggaran	Realisasi
2010	26.243.939.544,00	20.283.615.778,05
2011	27.346.615.417,00	19.686.833.802,76
2012	29.687.414.140,00	31.720.677.572,15
2013	36.471.129.208,00	38.776.667.265,57
2014	67.247.878.957,18	82.506.082.709,11
2015	69.458.314.821,00	79.195.391.761,15
2016	93.231.216.000,00	101.993.901.924,06
2017	150.563.647.813,00	92.386.607.533,21
2018	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94
2019	187.752.107.000,00	119.464.168.341,55
2020	125.559.974.000,00	102.397.096.654,18

Sumber Data : BAPENDA Kabupaten Tana Toraja

4.3.2 Analisis Data

4.3.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui nilai hasil output dari regresi berdistribusi berbentuk normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan layak apabila residu nilai yang dihasilkan terdistribusi normal. Jenis metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah dengan memperhatikan data yang tersebar berada di sumbu diagonal grafik normal *p-p plot of regression standarddizedresidual* atau melalui uji *one sample Kolmogorov sminov*. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (Priyanto, 2014:90).

Hasil pengujian untuk variabel penelitian disajikan pada table 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000114
	Std. Deviation	10943896826,32370200
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,237
	Positive	,237
	Negative	-,164
Test Statistic		,237
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

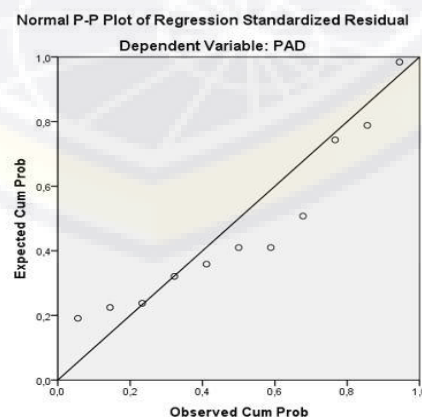
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Tabel 4.4 memberikan data hasil pengujian nilai Asymp.Sig (2-tailed) yang menghasilkan angka pada pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi memiliki nilai diangka 0,086 dan memenuhi syarat lebih dari 0,05 sehingga angka *residual* terdistribusi dengan normal.

Adapun pengujian dengan normalitas menggunakan grafik *normal p-p Plot Of Regression Residual* ditunjukkan melalui Gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Residual



Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Gambar 4.2 menghasilkan pengujian normalitas menggunakan Grafik *Normal P-P Plot of Regression Standard Residual* menunjukkan sebaran titik di area garis diagonal dan tersebar di sepanjang garis histogramnya. Hal tersebut berarti penelitian ini mempunyai distribusi pola yang normal. Distribusi pola normal terjadi apabila hasil sebaran data mengikuti garis diagonal.

Distribusi bentuk normal diartikan sebagai perbandingan antara variabel X_1 yakni pajak daerah dan X_2 yakni retribusi daerah berdasarkan data normal baku yang digunakan dan menghasilkan perbandingan nilai signifikan data yang diuji di atas sehingga dapat dilanjutkan pada tahap uji selanjutnya .

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat diartikan sebagai pengujian variabel independen pada metode regresi linear dengan koefisien korelasi bernilai 1 (sempurna) ataupun bernilai mendekati 1 (mendekati sempurna). Metode regresi linier yang baik apabila koefisien korelasi di antara variable bebasnya tidak bernilai 1 ataupun mendekati 1. Hasil uji multikolinieritas menggunakan metode regresi linier

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Coefficients ^a Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-319036457,490	10171116600,213		-,031	,976		
PAJAK	10,254	1,117	,965	9,176	,000	,969	1,032
RETRIBUSI	,133	,217	,065	,615	,556	,969	1,032

a. Dependent Variable: PAD

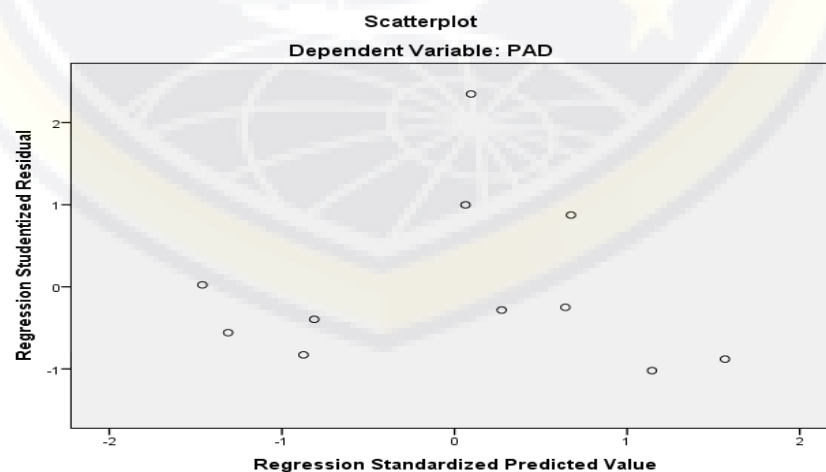
Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Tabel di atas menunjukkan nilai *Collinearity Statistics* pada kolom Tolerance dan VIF dari semua variabel bebas. Nilai Tolerance yang diperoleh dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar 0.969, dan nilai VIF yang diperoleh dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar 1.032, sehingga semua variabel tersebut telah memenuhi kriteria pada nilai Tolerance yaitu besar dari 0,1 dan VIF kecil dari 10, diartikan bahwa tidak terdapat multikolineritas antarvariabel bebas. Nilai variabel X_1 (pajak daerah) dan variable X_2 (retribusi daerah) menampilkan hubungan kedua variabel bebas berdasarkan hasil Tabel 4.5.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pola residual yang berbeda pada setiap metode regresi. Metode regresi dianggap baik apabila tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode grafik untuk mengetahui pola sebaran titik menggunakan metode regresi.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Gambar 4.3 menunjukkan varian sebaran titik dengan pola acak nilai positif dan negatif pada sumbu Y, sehingga diartikan tidak terdapat heteroskedastisitas metode regresi, sehingga metode regresi dapat digunakan pada variabel pajak daerah dan variable retribusi daerah berdasarkan variabel dependen yang ada yaitu PAD.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi linear terdapat korelasi di antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Auto korelasi terjadi dikarenakan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat gejala autokorelasi (priyatno, 2014). Dalam penelitian ini untuk menguji keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan uji statistic Durbin-Watson yang dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,914	,893	12235648621,20209	2,124

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Tabel 4.6 menggambarkan nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,124 yang dibandingkan dengan nilai DW tabel signifikan 5% berdasarkan ketentuan k-n. Penelitian memiliki dua variabel independen dan jumlah sampel yang ada adalah

11 maka dari itu nilai Durbin-Watson (d) ialah 2,124 lebih besar dari dU yaitu 1,6044 dengan nilai lebih kecil dari (4-dU) atau 4-1,6044 = 2,3956. Sehingga nilai Durbin-Watson sebesar 2,124 masuk pada kisaran 1,6044 hingga 2,3956 yang berarti bahwa variabel terbebas dari gejala autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda dapat digunakan untuk menampilkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis menggunakan metode tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rangkuman Hasil Analisis Linear Berganda
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-324398867,268	10174007554,101		-,032	,975		
	PAJAK	10,254	1,118	,965	9,174	,000	,969	1,032
	RETRIB USI	,134	,217	,065	,616	,555	,969	1,032

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Dari hasil analisis regresi linear berganda dari tabel diatas maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

\hat{Y} : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a : Konstanta

X_1 : Pajak Daerah

X_2 : Retribusi Daerah

b_1 : koefisien regresi untuk pajak daerah

b_2 : koefisien regresi untuk retribusi daerah

Adapun hasil perhitungan menggunakan persamaan di atas sebagai berikut:

$$Y = (-324398867,268) + 10,254X_1 + 0,134X_2 + e$$

dimana:

- 1) Nilai a sebagai konstanta -324398867,268 menunjukkan nilai variabel pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) dianggap nol (0) maka nilai pendapatan asli daerah (Y) menjadi -324398867,268. Dengan kata lain bahwa pada saat variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya PAD di Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar -324398867,268 dengan permisalan persamaan lainnya dianggap nol atau konstan.
- 2) Koefisien regresi pajak daerah sebesar 10,254 diartikan adanya peningkatan hubungan variabel pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 10,254. Hal ini diartikan dimana variabel independen X_1 meningkat 1 kali dan variabel bebas lainnya bernilai tetap, maka variabel Y akan meningkat sebanyak 10,254 kali.
- 3) Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 0,134 dimana ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,134. Hal ini diartikan dimana variabel independen X_2 meningkat 1 kali dan variabel bebas lainnya bernilai tetap, maka variabel Y akan meningkat sebanyak 0,134 kali.

4.3.2.2 Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji Parsial

Pengujian t bertujuan untuk mengetahui hubungan variable bebas yang dengan variable terikat dalam suatu model. Dengan kata lain hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variable bebas menjelaskan variable terikat. Oleh karena itu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan demikian variable bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable terikat. Berikut table pengujian statistik penelitian menggunakan metode ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-324398867,268	10174007554,101		-,032	,975		
	PAJAK	10,254	1,118	,965	9,174	,000	,969	1,032
	RETRIBUSI	,134	,217	,065	,616	,555	,969	1,032

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Dari table diatas kita dapat melihat hasil t_{hitung} dari masing-masing variable bebas. Dimana langkah selanjutnya adalah t_{hitung} penelitian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi senilai 0,05 dan derajat kebebasan $(df)=n-k=11-3=8$ maka nilai $t_{tabel}=2,306$, dari table 4.8 diartikan yakni:

a. Pajak Daerah

Pengujian pada variable pajak daerah (X_1) dihasilkan angka $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $(9,174 > 2,306)$, dengan nilai signifikansi kurang daripada 0,05 sebesar $(0,000 < 0,05)$, sehingga diartikan variable bebas yaitu pajak daerah (X_1)

berpengaruh signifikan terhadap variable bebas yaitu pendapatan asli daerah (Y). **sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.** Dengan itu dapat diartikan bahwa variable X_1 yaitu Pajak Daerah secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Retribusi Daerah

Pengujian variable retribusi daerah (X_1) dihasilkan angka $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $(0,616 < 2,306)$, dengan nilai signifikansi di atas 0,05 $(0,555 < 0,05)$, artinya variable bebas X_2 (retribusi daerah) secara signifikan tidak mempengaruhi variable terikat pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga **H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.** Dengan itu dapat diartikan bahwa retribusi daerah secara signifikan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

2. Uji Simultan

Pengujian f yakni menguji secara bersamaan variable independen guna melihat pengaruh variable independen menyeluruh terhadap variable dependen. Memperhatikan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan : $(df_1) = k-1 = 3-1 = 2$, $(df_2) = n-k = 11-3 = 8$. Diperoleh F_{tabel} yakni 4,246. Hasil tersebut disajikan pada table berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12756815531836514000000,000	2	6378407765918257000000,000	42,605	,000 ^b
	Residual	1197688777452196000000,000	8	149711097181524500000,000		
	Total	1395450430928871000000,000	10			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Dengan adanya hasil pengujian diatas maka dapat diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,605 dan F_{tabel} diperoleh sebesar 4,246, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($42,605 > 4,246$) dengan nilai signifikansi kurang 0,05 ($0,000 < 0,05$), oleh karena itu H_{03} tidak dapat diterima dan H_{a3} dapat diterima. Dengan itu kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya pengaruh diantara X_1 dan X_2 yang bernilai signifikan terhadap variable Y.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan sebagai pengukur untuk menghitung persentase pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien determinasi menghasilkan nilai yang mendekati nilai 1, itu berarti variable independen berpengaruh besar terhadap variable dependen. Berikut adalah data koefisien determinasi dari hasil penelitian ini:

Tabel 4.10
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,914	,893	12235648621 ,20209	2,124

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Berdasarkan table 4.10 diperoleh angka *R square* sebesar 0,914 atau 91,4% berperan pengaruh antara variable pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

4.4 Pembahasan Penelitian

Sesuai anggapan awal yang penulis jabarkan sebelumnya terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka setelah dilakukan penelitian memperoleh hasil uji F menunjukkan angka F_{hitung} ialah 42,605 dan F_{tabel} distribusi dengan tingkat kesalahan 5% ialah 4,246. Data ini menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($42,605 > 4,246$) dengan begitu anggapan awal yang sebagai jawaban sementara atas penelitian ini dianggap benar.

Jawaban sementara berikutnya adalah dugaan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi tidak cukup mempengaruhi PAD pada Kab. Tana Toraja. Dibawah ini merupakan pembahasan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang menyatakan variable X_1 dalam hal ini ialah pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variable Y yakni PAD di Kab Tana Toraja. Hasil tersebut dapat kita ketahui melalui taraf signifikansi pada variabel (X_1) yakni senilai $0,000 < 0,05$. Maka kita dapat menarik kesimpulan H_{01} berarti tidak diterima sedangkan H_{a1} diterima.

Hasil analisa melalui metode regresi linear berganda memberikan hasil bahwa nilai konstanta (a) ialah -324398867,268 maka arti dari data tersebut ialah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah bernilai 0, dengan itu nilai dari pendapatan asli daerah adalah sebesar -324398867,268. Koefisien regresi variabel pajak daerah (X_1) sebesar 10,254 yang dapat diartikan bahwa apabila variabel

(X_1) mengalami peningkatan senilai 1 satuan dengan anggapan untuk variabel lain bersifat konstan, maka variabel (Y) juga tentu meningkat sebesar 10,254 satuan.

Nilai perkalian dari variabel (X_1) ialah 10,254 sebagai koefisiennya dan berarti angka $10.254 > 0,05$ oleh karena itu dalam uji yang dilakukan ini memiliki makna **H_{01} tidak dapat diterima dan H_{a1} diterima** dimana hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan memiliki pengaruh terhadap PAD.

Secara statistik penelitian ini memiliki hasil analisis dimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Tana Toraja memiliki nilai yang signifikan sehingga dapat dibuktikan bahwa hipotesis yang digunakan pada penelitian ini memiliki pengaruh PAD. Selain dari penelitian yang penulis lakukan ini, terdapat penelitian yang mendukung pernyataan penulis yaitu penelitian terdahulu oleh penelitian terdahulu Zahari (2016), Fitriani (2016), dan Putri (2016) yang dalam penelitiannya mengemukakan hal serupa yakni pajak daerah berpengaruh secara signifikan PAD.

Dan ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya objek wisata yang ada di kabupaten Tana Toraja, dengan demikian banyak pihak yang berniat untuk memulai bisnis dibidang penginapan, makanan khas, dan beberapa tempat lainnya seperti restoran dan toko pernak pernik khas Kab Tana Toraja. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak daerah atas hasil bisnis tersebut.

Dengan demikian potensi pajak pada Kabupaten Tana Toraja masih perlu dilakukan penggalan yang maksimal agar meningkatkan penerimaan perpajakan daerah. Sehingga apabila pendapatan pajak meningkat maka pendapatan asli daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuji diperoleh hasil yang menggambarkan variabel (X_2) tidak cukup mempengaruhi variabel Y yakni PAD yang dilihat dari taraf signifikansi variabel X_2 dengan nilai hanya $0,555 > 0,05$. Maka dengan nilai $0,555$ itu dapat ditarik kesimpulan bahwa **H_{02} diterima** dan **H_{a2} ditolak**. Dengan ini menggambarkan apabila makin besar nilai penerimaan retribusi hal tersebut kurang menjadi penyebab alasan meningkatnya PAD pada Kab. Tana Toraja

Dengan perhitungan statistic hasil analisa pengaruh retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja menghasilkan nilai yang menggambarkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Selain dari penelitian yang dilakukan penulis, terdapat pula penelitian lainnya yang berpendapat sama yaitu Asteria (2015) dan Rukmana (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa retribusi daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.

Dengan adanya hasil dan pendapat seperti ini, dibutuhkan upaya untuk menggali potensi terkait retribusi di Kabupaten Tana Toraja yang lebih maksimal lagi, agar pendapatan daerah dari retribusi bisa meningkat daripada saat ini sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap PAD.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari data dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan variabel (X_1) dan variabel (X_2) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y). Dapat dilihat dari hasil pengujian F_{hitung}

memperoleh nilai 42,605 dan F_{tabel} diperoleh dengan nilai 4,246, dengan nilai signifikan senilai 0,000. Dengan demikian $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($42,605 > 4,246$) karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari angka 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan demikian hipotesis atau anggapan awal ketiga (H_{a3}) dari penulis yang beranggapan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD, maka **H_{03} tidak dapat diterima dan H_{a3} diterima.** Penelitian ini memberi arti bila pendapatan pajak daerah meningkat nilainya maka akan meningkatkan pula PAD Kabupaten Tana Toraja.

Kontribusi bersamaan antara variabel X_1 yakni pajak daerah dan X_2 yakni retribusi daerah secara simultan terhadap Variabel Y yakni pendapatan asli daerah (PAD) adalah senilai 91,4% dan faktor lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini bernilai 8,6%.

Dari data dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil yang menyatakan variabel (X_1) dan variabel (X_2) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y). Dapat dilihat dari hasil pengujian F_{hitung} memperoleh nilai 42,605 dan F_{tabel} diperoleh dengan nilai 4,246, dengan nilai signifikan senilai 0,000. Dengan demikian $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($42,605 > 4,246$) karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari angka 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan demikian hipotesis atau anggapan awal ketiga (H_{a3}) dari penulis yang beranggapan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD, maka **H_{03} tidak dapat diterima dan H_{a3} diterima.** Penelitian ini memberi arti bila pendapatan pajak daerah meningkat nilainya maka akan meningkatkan pula PAD Kabupaten Tana Toraja.

Kontribusi bersamaan antara variabel X1 yakni pajak daerah dan X2 yakni retribusi daerah secara simultan terhadap Variabel Y yakni pendapatan asli daerah (PAD) adalah senilai 91,4% dan faktor lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini bernilai 8,6%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pajak Daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja, apabila penerimaan Pajak Daerah besar maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun semakin besar pada Kabupaten Tana Toraja. Wisata di Kabupaten Tana Toraja mengalami perkembangan dengan pesat sehingga memicu tingkat penerimaan pajak daerah menjadi lebih tinggi di Kabupaten Tana Toraja.
2. Berbeda dengan pajak daerah, Retribusi Daerah menghasilkan data yang ternyata tidak signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Retribusi Daerah meningkat namun tidak mempengaruhi realisasi dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Alasan yang menyebabkan pendapatan retribusi masih rendah dikarenakan Pemerintah belum mengelola retribusi secara optimal dan lemahnya aturan terkait hukuman atau sanksi bagi yang tidak membayar retribusi.
3. Secara keseluruhan pada penelitian ini disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja. Kesimpulan ini dipengaruhi dengan angka penerimaan pajak daerah cukup besar dan ketika diperhatikan secara keseluruhan antara pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh

secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja.

4. Dalam pengujian dari indikator koefisien determinasi, diperoleh hasil R^2 adalah 0,914 atau 91,4%. Data tersebut berarti kedua variabel independen X_1 X_2 hanya memaparkan variabel dependen Y sebesar 8,6% dan sisanya dipaparkan oleh faktor diluar model penelitian ini. X_1 adalah pajak, X_2 adalah retribusi dan Y adalah PAD.

5.2 SARAN

Adapun saran yang penulis dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel indenpenden selain yang dibahas pada penelitian ini dan memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai variable yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Masyarakat Tana Toraja diharapkan agar bertanggungjawab dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesadaran tersebut dapat menjadi pengaruh yang baik terhadap penerimaan pendapatan pada pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja untuk kiranya melakukan upaya dalam meningkatkan potensi daerah khususnya pajak dan retribusi. Mengoptimalkan penggalian potensi pajak dan retribusi akan memberi peningkatan pendapatan daerah serta memberi dampak positif dan pengaruh signifikan serta lebih berkontribusi terhadap PAD sehingga dapat mengelola keuangan dan pemerintahan daerah lebih baik lagi

dan menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat.



DAFTAR PUSTAKA

Achmad, E. Kuncoro dan Riduwan. 2014. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta

Anggoro, Damas Dwi .2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press

Bambang Prakosa Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.

Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta.

Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*.Yogyakarta: CV Andi Offset.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo

Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

wenny, CD. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2. Pp. 39-51

Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/13700/13282>

<https://eprints.uny.ac.id/7755/3/BAB%202-09409131029.pdf>

<https://www.wikiapbn.org/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1651/1274>



LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Hasil Uji Nomalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000114
	Std. Deviation	10943896826,32370200
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,237
	Positive	,237
	Negative	-,164
Test Statistic		,237
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086 ^c

a. Test distribution is Normal.

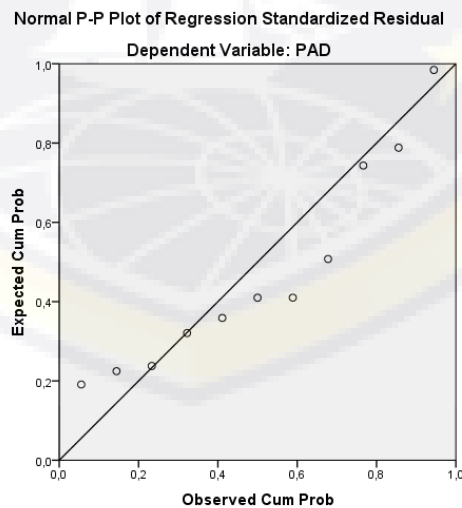
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 2 :

Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Residual



Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 3 :

Hasil Uji Multikolineritas

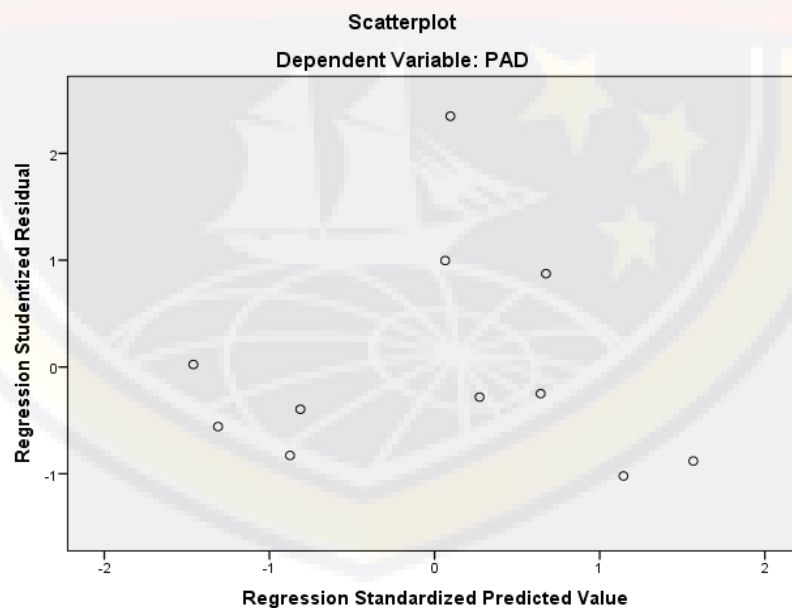
Model	Coefficient						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig .	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-319036457,490	10171116600,213		-,031	,976		
PAJAK	10,254	1,117	,965	9,176	,000	,969	1,032
RETRIBUSI	,133	,217	,065	,615	,556	,969	1,032

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 4 :

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 5 :

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,914	,893	12235648621,20209	2,124

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 6 :

Rangkuman Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-324398867,268	10174007554,101		-,032	,975		
PAJAK	10,254	1,118	,965	9,174	,000	,969	1,032
RETRIBUSI	,134	,217	,065	,616	,555	,969	1,032

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 7 :

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-324398867,268	10174007554,101				
	PAJAK	10,254	1,118	,965	9,174	,000	,969
	RETRIBUSI	,134	,217	,065	,616	,555	,969

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 8 :

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1275681553183651400000,000	2	6378407765918257000000,000	42,605	,000 ^b
	Residual	1197688777452196000000,000	8	149711097181524500000,000		
	Total	1395450430928871000000,000	10			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

Lampiran 9 :

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,914	,893	12235648621 ,20209	2,124

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Data : Diolah dengan menggunakan SPSS 25

BOSOWA



Lampiran 10 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.091.100.000,00	1.811.302.161,00	(279.797.839,00)	86,62%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.272.312.544,00	13.486.190.040,00	(6.786.122.504,00)	66,53%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.005.000.000,00	819.344.341,12	(185.655.658,88)	81,53%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.875.527.000,00	4.166.779.235,93	1.291.252.235,93	144,90%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.243.939.544,00	20.283.615.778,05	(5.960.323.765,95)	77,28%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	21.294.432.361,00	22.770.479.985,00	1.476.047.624,00	106,93%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	22.912.194.082,00	885.550.525,00	(22.026.643.557,00)	3,86%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	297.364.598.000,00	297.364.598.000,00	-	100,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	49.336.800.000,00	49.336.800.000,00	-	100,00%
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	390.908.024.443,00	370.357.428.510,00	(20.550.595.933,00)	94,74%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	59.942.000.475,00	53.998.700.475,00	(5.943.300.000,00)	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	59.942.000.475,00	53.998.700.475,00	(5.943.300.000,00)	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.800.000.000,00	9.414.577.342,43	2.614.577.342,43	138,45%
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	6.800.000.000,00	9.414.577.342,43	2.614.577.342,43	138,45%
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	457.650.024.918,00	433.770.706.327,43	(23.879.318.590,57)	94,78%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00%
		11.905.320.888,00	10.976.148.840,00	(929.172.048,00)	92,20%
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.905.320.888,00	10.976.148.840,00	(1.929.172.048,00)	85,05%
	JUMLAH PENDAPATAN	496.799.285.350,00	465.030.470.945,48	(31.768.814.404,52)	93,61%
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	276.084.010.730,36	268.321.602.564,00	(7.762.408.166,36)	97,19%
2.1.2	Belanja Barang	52.096.854.630,20	48.808.707.075,00	(3.288.147.555,20)	93,69%
2.1.3	Belanja Bunga	172.000.000,00	171.894.255,26	(105.744,74)	99,94%
2.1.5	Belanja Hibah	15.884.300.000,00	14.765.545.968,00	(1.118.754.032,00)	92,96%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.903.450.000,00	4.733.095.375,00	(170.354.625,00)	96,53%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	7.350.000.000,00	0,00	(7.350.000.000,00)	0,00%
	Jumlah Belanja Operasi	356.490.615.360,56	336.800.845.237,26	(19.689.770.123,30)	94,48%
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	3.455.440.000,00	10.000.000,00	(3.445.440.000,00)	0,29%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.549.269.096,00	21.903.281.845,00	(17.645.987.251,00)	55,38%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	26.968.810.634,00	16.361.852.216,00	(10.606.958.418,00)	60,67%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.623.478.030,00	30.226.155.418,00	(21.397.322.612,00)	58,55%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	384.522.000,00	379.941.875,00	(4.580.125,00)	98,81%
	Jumlah Belanja Modal	121.981.519.760,00	68.881.231.354,00	(53.100.288.406,00)	56,47%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	875.000.000,00	521.377.500,00	(353.622.500,00)	59,59%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	875.000.000,00	521.377.500,00	(353.622.500,00)	59,59%

Lampiran 11 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

No.	Uraian	Anggaran 2011 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	%	Realisasi 2010 (Rp)
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.141.100.000,00	2.356.018.513,00	110,04%	1.811.302.161,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.454.598.000,00	11.572.395.784,75	56,58%	13.486.190.040,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.996.835.417,00	1.043.035.417,00	52,23%	819.344.341,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.754.082.000,00	4.715.384.088,01	171,21%	4.166.779.235,93
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.346.615.417,00	19.686.833.802,76	71,99%	20.283.615.778,05
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.647.342.219,00	21.688.480.719,00	56,12%	22.770.479.985,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	114.911.802,00	1.918.131.122,00	1669,22%	885.550.525,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	322.759.399.000,00	322.759.399.000,00	100,00%	297.364.598.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	58.028.600.000,00	58.016.200.000,00	99,98%	49.336.800.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	419.550.253.021,00	404.382.210.841,00	96,38%	370.357.428.510,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00		53.998.700.475,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	96.246.635.640,00	96.246.635.640,00	100,00%	53.998.700.475,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	96.246.635.640,00	96.246.635.640,00	100,00%	53.998.700.475,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.928.096.612,00	13.901.043.196,96	93,12%	9.414.577.342,43
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00		
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	14.928.096.612,00	13.901.043.196,96	93,12%	9.414.577.342,43
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	530.724.985.273,00	514.529.889.677,96	96,95%	433.770.706.327,43
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.987.239.000,00	22.987.239.000,00	100,00%	0,00
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi	29.477.478.120,00	31.477.478.120,00	106,78%	10.976.148.840,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	52.464.717.120,00	54.464.717.120,00	103,81%	10.976.148.840,00
	JUMLAH PENDAPATAN	610.536.317.810,00	588.681.440.600,72	96,42%	465.030.470.945,48
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	300.861.701.131,00	292.021.803.213,00	97,06%	268.321.602.564,00
2.1.2	Belanja Barang	76.345.881.042,00	69.443.698.432,00	90,96%	48.808.707.075,00
2.1.3	Belanja Bunga	195.000.000,00	149.712.390,96	76,78%	171.894.255,26
2.1.5	Belanja Hibah	18.010.023.000,00	17.819.081.500,00	98,94%	14.765.545.968,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.387.200.000,00	4.090.726.615,25	93,24%	4.733.095.375,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	11.643.633.070,00	11.590.820.882,00	99,55%	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	411.443.438.243,00	395.115.843.033,21	96,03%	336.800.845.237,26
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	39.848.602.000,00	29.164.281.423,00	73,19%	10.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.158.006.976,00	16.832.476.077,00	87,86%	21.903.281.845,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	47.466.698.485,00	20.650.717.497,00	43,51%	16.361.852.216,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.181.088.275,00	90.979.929.520,00	89,92%	30.226.155.418,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.547.119.000,00	8.525.054.960,00	99,74%	379.941.875,00
	Jumlah Belanja Modal	216.201.514.736,00	166.152.459.477,00	76,85%	68.881.231.354,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.959.000,00	116.995.000,00	77,50%	521.377.500,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	150.959.000,00	116.995.000,00	77,50%	521.377.500,00

Lampiran 12 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

No.	Uraian	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi 2012 (Rp)	%	Realisasi 2011 (Rp)
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.348.050.000,00	3.736.529.606,00	159,13%	2.356.018.513,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.176.813.000,00	22.338.063.489,69	110,71%	11.572.395.784,75
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.245.000.000,00	1.038.700.633,63	83,43%	1.043.035.417,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.917.551.140,00	4.607.383.842,63	77,85%	4.715.384.088,01
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			106,85%	19.686.833.802,76
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.687.414.140,00	31.720.677.572,15		
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	34.503.894.031,00	23.346.060.438,00	67,66%	23.606.611.841,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	389.286.812.000,00	389.286.812.000,00	100,00%	322.759.399.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	64.649.650.000,00	64.649.650.000,00	100,00%	58.016.200.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus			97,72%	404.382.210.841,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	488.440.356.031,00	477.282.522.438,00		
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00		96.246.635.640,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00		96.246.635.640,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00		
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	16.864.880.784,00	16.326.230.691,20	96,81%	13.901.043.196,96
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00		
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16.864.880.784,00	16.326.230.691,20	96,81%	13.901.043.196,96
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	16.864.880.784,00	16.326.230.691,20		
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	505.305.236.815,00	493.608.753.129,20		514.529.889.677,96
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	55.404.204.000,00	50.478.933.000,00	91,11%	22.987.239.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.169.949.340,00	13.802.584.430,00	113,42%	31.477.478.120,00
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi	67.574.153.340,00	64.281.517.430,00	95,13%	54.464.717.120,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	67.574.153.340,00	64.281.517.430,00		54.464.717.120,00
	JUMLAH PENDAPATAN	602.566.804.295,00	589.610.948.131,35	97,85%	588.681.440.600,72
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	342.532.815.814,59	336.131.197.761,00	98,13%	292.021.803.213,00
2.1.1	Belanja Pegawai	92.211.191.858,00	79.930.665.222,00	86,68%	69.443.698.432,00
2.1.2	Belanja Barang	195.000.000,00	127.895.160,05	65,59%	149.712.390,96
2.1.3	Belanja Bunga	7.219.500.000,00	7.164.828.000,00	99,24%	17.819.081.500,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.847.600.000,00	1.625.600.000,00	87,98%	4.090.726.615,25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.297.383.652,00	12.254.794.404,00	99,65%	11.590.820.882,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			95,82%	395.115.843.033,21
	Jumlah Belanja Operasi	456.303.491.324,59	437.234.980.547,05		
2.2	BELANJA MODAL	3.375.000.000,00	934.147.370,00	27,68%	29.164.281.423,00
2.2.1	Belanja Tanah	39.000.197.301,00	36.824.023.203,00	94,42%	16.832.476.077,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	60.414.160.722,00	57.002.095.272,00	94,35%	20.650.717.497,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	63.476.141.845,00	55.658.786.188,00	87,68%	90.979.929.520,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.147.007.000,00	2.629.238.000,00	83,55%	8.525.054.960,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			90,34%	166.152.459.477,00
	Jumlah Belanja Modal	169.412.506.868,00	153.048.290.033,00		
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	807.757.180,00	80,78%	116.995.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	807.757.180,00	80,78%	116.995.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	807.757.180,00		

Lampiran 13 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

No.	Uraian	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.398.050.000,00	3.882.204.835,00	161,89%	3.736.529.606,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.571.924.734,00	27.834.717.233,30	100,95%	22.338.063.489,69
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.695.598.334,00	1.675.382.181,00	98,81%	1.038.700.633,83
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.805.556.140,00	5.384.363.016,27	112,04%	4.607.383.842,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.471.129.208,00	38.776.667.265,57	106,32%	31.720.677.572,15
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Buan Pajak	23.766.916.630,00	20.335.230.267,00	85,56%	23.346.060.438,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	444.741.329.000,00	444.741.329.000,00	100,00%	389.286.812.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	55.955.450.000,00	55.955.450.000,00	100,00%	64.649.650.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	524.463.695.630,00	521.032.009.267,00	99,35%	477.282.522.438,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	68.068.587.696,00	66.439.028.000,00	97,61%	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68.068.587.696,00	66.439.028.000,00	97,61%	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.865.005.784,00	17.091.986.523,23	90,60%	16.326.230.691,20
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	18.865.005.784,00	17.091.986.523,23	90,60%	16.326.230.691,20
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	611.397.289.110,00	604.563.023.790,23	98,88%	493.608.753.129,20
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	759.088.000,00	36,15%	50.478.933.000,00
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi	15.786.271.000,00	15.786.271.000,00	100,00%	13.802.584.430,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.886.271.000,00	16.545.359.000,00	92,50%	64.281.517.430,00
	JUMLAH PENDAPATAN	665.754.689.318,00	659.885.050.055,80	99,12%	589.610.948.131,35
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	392.877.864.314,45	366.305.716.050,02	93,24%	336.131.197.761,00
2.1.2	Belanja Barang	110.783.102.024,00	95.813.663.727,55	86,49%	79.930.665.222,00
2.1.3	Belanja Bunga	162.000.000,00	105.348.662,36	65,03%	127.895.160,05
2.1.5	Belanja Hibah	12.838.846.000,00	10.612.036.237,00	82,66%	7.164.828.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	152.600.000,00	90.600.000,00	59,37%	1.625.600.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	449.980.464,00	449.980.464,00	100,00%	12.254.794.404,00
	Jumlah Belanja Operasi	517.264.392.802,45	473.377.345.140,93	91,52%	437.234.980.547,05
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	9.400.735.270,00	396.618.954,00	4,22%	934.147.370,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.994.309.235,00	27.004.736.279,00	93,14%	36.824.023.203,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	26.178.168.661,00	23.494.599.738,00	89,75%	57.002.095.272,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.762.293.660,00	66.608.168.187,00	81,47%	55.658.786.188,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	654.990.000,00	505.973.890,00	77,25%	2.629.238.000,00
	Jumlah Belanja Modal	146.990.496.826,00	118.010.097.048,00	80,28%	153.048.290.033,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	206.086.700,00	5,89%	807.757.180,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	206.086.700,00	5,89%	807.757.180,00

Lampiran 14 :



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
 (SETELAH AUDIT)

URAIAN	2014		%	2013
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.057.372.000,00	6.516.318.116,29	128,85	3.882.204.835,00
Pendapatan Pajak Daerah	45.475.887.989,00	59.960.987.370,61	131,85	27.834.717.233,30
Pendapatan Retribusi Daerah	2.219.063.221,00	2.198.848.136,00	99,09	1.675.362.181,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.489.565.747,18	13.829.929.086,21	95,41	5.384.363.016,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.247.878.957,18	82.506.082.709,11	122,69	38.778.667.265,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	14.776.602.747,00	21.121.300.355,00	142,95	20.335.230.267,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	486.447.423.000,00	486.447.423.000,00	100,00	444.741.329.000,00
Dana Alokasi Umum	58.947.980.000,00	58.947.980.000,00	100,00	55.955.450.000,00
Dana Alokasi Khusus	660.171.005.747,00	666.616.703.355,00	101,13	521.032.009.267,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00		
Dana Otonomi Khusus	86.072.426.000,00	75.079.768.000,00	87,23	66.439.028.000,00
Dana Penyesuaian	86.072.426.000,00	75.079.768.000,00	87,23	66.439.028.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Transfer Pemerintah Provinsi	25.135.265.756,00	21.006.844.686,59	83,58	17.091.986.523,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.135.265.756,00	21.006.844.686,59	83,58	17.091.986.523,23
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	671.378.697.503,00	662.603.316.041,59	98,69	604.663.023.790,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	759.088.000,00
Pendapatan Hibah	23.424.995.440,00	12.264.995.440,00	52,36	15.786.271.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi	23.424.995.440,00	12.264.995.440,00	52,36	16.546.359.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN	762.051.671.900,18	757.374.394.190,70	99,39	659.885.050.056,80
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	429.738.219.000,18	405.910.690.697,00	94,46	366.305.716.050,02
Belanja Barang	133.122.947.909,00	116.060.844.775,50	87,18	95.813.663.727,55
Belanja Bunga	113.585.000,00	83.166.798,03	73,22	105.348.662,36
Belanja Hibah	9.523.948.400,00	8.232.484.942,00	86,44	10.612.036.237,00
Belanja Bantuan Sosial	3.452.600.000,00	3.322.308.152,00	96,23	540.580.464,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	576.951.300.309,18	533.609.505.664,53	92,56	473.377.345.140,93
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	9.104.930.270,00	0,00	0,00	396.618.954,00
Belanja Peralatan dan Mesin	38.051.408.160,00	33.165.046.063,00	87,16	27.004.736.279,00
Belanja Gedung dan Bangunan	49.931.545.361,00	35.017.231.346,00	70,13	23.494.599.738,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.183.670.836,00	120.015.758.838,00	88,13	66.608.168.187,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.339.235.000,00	164.194.500,00	3,78	505.973.890,00
Jumlah Belanja Modal	237.610.789.627,00	188.362.230.747,00	79,27	118.010.097.048,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	0,00	0,00	208.086.700,00
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	0,00	0,00	208.086.700,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga				
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	599.800.000,00	599.088.000,00	99,86	0,00
Bagi Hasil Retribusi	1.483.000.000,00	1.055.017.260,00	71,14	1.042.522.760,00
Alokasi Dana Lembang	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Transfer	12.882.800.000,00	12.464.105.260,00	96,67	1.042.522.760,00
JUMLAH BELANJA	830.444.889.936,18	734.426.841.661,63	88,44	592.636.061.838,93
Surplus/Defisit	(68.393.318.036,00)	22.948.652.529,17		67.248.998.416,87
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	72.108.261.305,00	72.108.261.305,88	100,00	16.195.865.278,45
Sisa UUDP Tahun Lalu	0,00	1.764.880.655,00	0,00	2.433.517.756,33
Saldo Awal 1 Januari 2014	0,00	70.343.380.650,88	0,00	12.762.347.522,12
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.108.261.305,00	72.108.261.305,88	100,00	16.195.865.278,45

Lampiran 15 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN		79.195.391.761,15
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.458.314.821,00	79.195.391.761,15
4. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	4.980.454.000,00	7.391.259.988,50
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	83.454.000,00	333.153.689,00
4. 1. 1. 01. 01.	Pajak Hotel		100.168.147,00
4. 1. 1. 01. 04	Hotel Bintang Tiga	53.100.000,00	54.171.400,00
4. 1. 1. 01. 05	Hotel Bintang Dua	10.000.000,00	28.963.650,00
4. 1. 1. 01. 07	Hotel Melati Tiga	7.000.000,00	10.738.000,00
4. 1. 1. 01. 08	Hotel Melati Dua	10.089.000,00	8.831.800,00
4. 1. 1. 01. 09	Hotel Melati Satu	3.265.000,00	130.280.682,00
4. 1. 1. 01. 14	Tunggakan Pajak Hotel		
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	212.000.000,00	311.558.290,00
4. 1. 1. 02. 01	Restoran	132.000.000,00	174.398.547,00
4. 1. 1. 02. 02	Rumah Makan	70.000.000,00	69.861.000,00
4. 1. 1. 02. 03	Kafetaria	10.000.000,00	3.603.500,00
4. 1. 1. 02. 06	Tunggakan Pajak Restoran		61.207.243,00
4. 1. 1. 02. 07	Tunggakan Pajak Karaoke		2.488.000,00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	2.600.000,00
4. 1. 1. 03. 14	Balap Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4. 1. 1. 03. 15	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	2.600.000,00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	100.000.000,00	176.538.968,00
4. 1. 1. 04. 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	70.000.000,00	130.435.133,00
4. 1. 1. 04. 02	Pajak Reklame Kain	30.000.000,00	34.771.460,00
4. 1. 1. 04. 12	Tunggakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron		11.332.375,00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000,00	2.949.849.344,00
4. 1. 1. 05. 01	Pajak Penerangan Jalan Sumber PLN	1.800.000.000,00	2.949.849.344,00
4. 1. 1. 11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.181.678.019,50
4. 1. 1. 11. 12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	700.000.000,00	1.116.614.819,50
4. 1. 1. 11. 13	Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipungut dengan Karos		65.063.200,00
4. 1. 1. 12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.925.315.128,00
4. 1. 1. 12. 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.898.396.235,00
4. 1. 1. 12. 02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		26.918.893,00

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
4.1.1.13.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	180.000.000,00	510.566.550,00
		180.000.000,00	510.566.550,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	50.381.825.600,00	48.780.154.003,50
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	46.938.200.600,00	44.877.380.500,50
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
	a. Dinas Kesehatan	45.796.225.600,00	43.296.657.375,50
	- Pemeksaan Kualitas Air	2.755.000.000,00	2.691.594.600,00
	- Layanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)	5.000.000,00	5.662.600,00
	- Jasa Pelayanan Daerah Terpencil	2.750.000.000,00	2.488.500.000,00
	- Dana Non Kapitasi	-	2.927.500,00
	- Dana Non Kapitasi Tahun 2014	-	186.104.500,00
	- Dana Non Kapitasi Tahun 2014	-	8.400.000,00
	b. RSUD Laki padada	43.001.225.600,00	40.605.062.775,50
	- Jasa Sarana Rawat Inap/Rawat Jalan	22.000.000.000,00	17.179.842.781,38
	- Instalasi Farmasi	3.001.225.600,00	3.512.845.147,00
	- Jasa Pelayanan	18.000.000.000,00	16.733.817.753,12
	- Tunggakan Jasa Sarana	-	1.525.094.360,00
	- Tunggakan Jasa Instalasi Farmasi	-	194.887.350,00
	- Tunggakan Jasa Pelayanan	-	1.458.575.384,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	72.000.000,00	100.245.000,00
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK dan Akte Catatan Sipil	229.975.000,00	334.800.000,00
	- Kartu Keluarga	84.975.000,00	169.195.000,00
	- Akte Kelahiran Pengurusan Terlambat 60 hari sejak kelahiran	5.000.000,00	-
	- Akte Kelahiran WNA Anak I dan II	400.000,00	-
	- Akte Kelahiran WNA Anak III dst	600.000,00	-
	- Penerbitan II	6.225.000,00	-
	- Perubahan Nama	10.400.000,00	-
	- Perkawinan WNI di dalam kantor	30.000.000,00	68.400.000,00
	- Perkawinan WNI di luar kantor	50.000.000,00	58.500.000,00
	- Perkawinan WNA di dalam kantor	1.800.000,00	500.000,00
	- Perkawinan WNA di luar kantor	2.250.000,00	-
	- Perkawinan WNI di dalam kantor (hari libur)	5.000.000,00	-
	- Perkawinan WNI di luar kantor (hari libur)	4.000.000,00	800.000,00
	- Perkawinan WNI di dalam kantor (terlambat)	1.900.000,00	6.370.000,00
	- Perkawinan WNI di luar kantor (terlambat)	2.000.000,00	-
	- Penerbitan II Perkawinan WNI	2.000.000,00	2.625.000,00
	- Penerbitan II Perkawinan WNA	600.000,00	-
	- Perceraian WNI	4.000.000,00	21.000.000,00
	- Perceraian WNI (terlambat)	300.000,00	1.500.000,00
	- Penerbitan II Perceraian	2.000.000,00	-
	- Akte Kematian	1.175.000,00	-
	- Pengakuan Anak	5.000.000,00	-
	- Akte Kenal Lahir	750.000,00	-

Lampiran 16 :

Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN		
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.231.216.000,00	101.993.901.924,06
4. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.658.815.000,00	7.336.005.910,00
4. 1. 1. 01.	Pajak Hotel	217.354.000,00	388.738.979,00
4. 1. 1. 01 04	Hotel Bintang Tiga	70.000.000,00	137.155.989,00
4. 1. 1. 01 05	Hotel Bintang Dua	30.000.000,00	97.026.379,00
4. 1. 1. 01 07	Hotel Melati Tiga	19.000.000,00	25.329.680,00
4. 1. 1. 01 08	Hotel Melati Dua	10.089.000,00	10.102.500,00
4. 1. 1. 01 09	Hotel Melati Satu	8.265.000,00	11.204.900,00
4. 1. 1. 01 15	Tunggakan Pajak Hotel	80.000.000,00	105.999.531,00
4. 1. 1. 02.	Pajak Restoran	266.665.000,00	358.330.511,00
4. 1. 1. 02 01	Restoran	140.000.000,00	224.360.330,00
4. 1. 1. 02 02	Rumah Makan	70.000.000,00	67.429.000,00
4. 1. 1. 02 03	Cafe	10.000.000,00	5.170.000,00
4. 1. 1. 02 09	Tunggakan Pajak Restoran	43.000.000,00	56.595.681,00
4. 1. 1. 02 10	Tunggakan Pajak Cafe	2.665.000,00	2.530.500,00
4. 1. 1. 02 11	Tunggakan Rumah Makan	1.000.000,00	2.265.000,00
4. 1. 1. 03.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.690.000,00
4. 1. 1. 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4. 1. 1. 03 15	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	1.680.000,00
4. 1. 1. 04.	Pajak Reklame	166.000.000,00	172.735.318,00
4. 1. 1. 04 01	Reklame Papan/Billboard/Video/Transparansi	100.000.000,00	110.390.031,00
4. 1. 1. 04 02	Reklame Kain	50.000.000,00	56.063.537,00
4. 1. 1. 04 05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	1.400.000,00
4. 1. 1. 04 11	Tunggakan Pajak Reklame	5.000.000,00	4.891.750,00
4. 1. 1. 05.	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00	3.101.033.892,00
4. 1. 1. 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.500.000.000,00	3.101.033.892,00
4. 1. 1. 11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.338.796.000,00	1.084.525.116,00
4. 1. 1. 11 12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.178.796.000,00	1.005.771.116,00
4. 1. 1. 11 13	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karis	160.000.000,00	77.809.400,00
4. 1. 1. 11 14	Tunggakan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karis		944.600,00
4. 1. 1. 12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.915.000.000,00	1.946.301.994,00
4. 1. 1. 12 01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.900.000.000,00	1.922.714.498,00
4. 1. 1. 12 02.	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.000.000,00	23.587.496,00
4. 1. 1. 13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000,00	284.640.100,00
4. 1. 1. 13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak	250.000.000,00	284.640.100,00
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.453.770.000,00	5.819.200.900,00
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	2.157.000.000,00	1.431.953.331,00
4. 1. 2. 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	205.000.000,00	301.958.631,00
	- Dinas Kesehatan	205.000.000,00	301.958.631,00
	- Pemeriksaan Kualitas Air	5.000.000,00	6.742.000,00
	- Layanan Kesehatan Gratis (Jamkesda)		849.631,00
	- Integritas Dana Jamkesda ke JKN	200.000.000,00	
	- Jasa Pelayanan Daerah Terpadu		2.036.000,00
	- Dana Non Kapitasi		284.139.000,00
	- Dana Non Kapitasi Tahun 2016		28.192.000,00
4. 1. 2. 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	72.000.000,00	100.032.500,00
4. 1. 2. 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	310.000.000,00	504.743.200,00
4. 1. 2. 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00	372.462.000,00
4. 1. 2. 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	135.000.000,00	118.757.000,00
4. 1. 2. 01 15	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kanvas	25.000.000,00	34.300.000,00
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	3.537.370.000,00	3.488.049.647,00
4. 1. 2. 02 01	Retribusi Penjualan Kekayaan Daerah	827.270.000,00	268.285.500,00
	- Pekerjaan Umum	250.000.000,00	181.398.000,00
	- Laboratorium		13.700.000,00

Laampiran 17 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PENDAPATAN PAD TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Total	
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	1.118.855.814.879,00	1.045.635.193.216,21	93,47%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.563.647.813,00	92.386.807.533,21	61,38%
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	10.500.000.000,00	9.211.461.706,70	87,73%
4.1.1.01.	Pajak Hotel	435.000.000,00	319.521.925,00	73,45%
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	93.702.910,00	93,70%
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	86.518.800,00	173,04%
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	18.909.020,00	37,82%
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	13.892.000,00	27,78%
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	7.732.600,00	15,47%
4.1.1.01.15.	Tunggakan Pajak Hotel	135.000.000,00	98.766.595,00	73,16%
4.1.1.02.	Pajak Restoran	625.000.000,00	324.197.438,00	51,87%
4.1.1.02.01.	Restoran	255.000.000,00	175.910.060,00	68,98%
	- Restoran Makuta'		1.033.863,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Sangalla		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Pantan Toraja		35.918.425,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Panorama		1.160.800,00	#DIV/0!
	- Restoran Balupapan		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Puri Artha		37.240.700,00	#DIV/0!
	- Restoran Hotel Sahid		93.710.532,00	#DIV/0!
	- Restoran Bambu		1.055.000,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Idaman		542.500,00	#DIV/0!
	- Restoran Depot 99		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Kampung Wisata		2.937.640,00	#DIV/0!
	- Restoran Lesehan Putri		502.200,00	#DIV/0!
	- Restoran KFC		528.400,00	#DIV/0!
	- Restoran Bui-Bui		0,00	#DIV/0!
	- Restoran Rumah Makan Cafe Bolang		1.280.000,00	#DIV/0!
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	100.000.000,00	71.558.000,00	71,56%
4.1.1.02.03.	Cafe	50.000.000,00	5.680.500,00	11,36%
4.1.1.02.09.	Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	56.786.376,00	37,86%
4.1.1.02.10.	Tunggakan Pajak Karaoke	50.000.000,00	8.434.500,00	16,87%
4.1.1.02.11.	Tunggakan Rumah Makan	20.000.000,00	5.828.000,00	29,14%
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000,00	638.000,00	3,19%
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.1.03.15.	Permainan Kelangkaan	10.000.000,00	638.000,00	6,38%
4.1.1.04.	Pajak Reklame	375.000.000,00	200.780.200,00	53,54%
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	300.000.000,00	62.065.075,00	20,69%
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	75.000.000,00	135.888.500,00	181,16%
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan		0,00	#DIV/0!
4.1.1.04.11.	Tunggakan Pajak Reklame		2.826.625,00	#DIV/0!
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00	3.912.200.431,00	97,81%
4.1.1.05.01.	Penerangan Jalan Sumber PLN	4.000.000.000,00	3.912.200.431,00	97,81%
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.520.000.000,00	1.581.306.788,70	62,75%
4.1.1.11.12.	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	2.000.000.000,00	1.526.289.388,70	76,31%
4.1.1.11.13.	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	51.690.000,00	9,94%
4.1.1.11.14.	Tunggakan Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis		3.327.400,00	#DIV/0!
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.025.000.000,00	2.050.227.658,00	101,25%
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.000.000.000,00	2.024.981.265,00	101,25%
4.1.1.12.02.	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	25.246.393,00	100,99%
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000,00	822.589.268,00	164,52%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Total	
1	2	3	12	
4. 1. 1. 13. 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	500.000.000,00	822.589.268,00	164,52%
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	9.750.000.000,00	7.742.272.692,00	79,41%
4. 1. 2. 01.	Retribusi Jasa Umum	1.700.000.000,00	1.487.217.500,00	87,48%
4. 1. 2. 01. 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	388.118.500,00	155,25%
	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	388.118.500,00	155,25%
	- Pemeriksaan Kualitas Air		8.049.500,00	#DIV/0!
	- Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)	250.000.000,00	380.069.000,00	152,03%
	- Tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan		0,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 01. 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	110.045.000,00	73,36%
	- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	110.045.000,00	73,36%
	Tunggakan Persampahan		0,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 01. 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	452.804.000,00	75,47%
4. 1. 2. 01. 06	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	415.980.000,00	83,20%
4. 1. 2. 01. 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	107.394.000,00	71,60%
4. 1. 2. 01. 11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	11.500.000,00	23,00%
4. 1. 2. 01. 15	Tunggakan Retribusi Pasar		1.376.000,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 02.	Retribusi Jasa Usaha	7.115.000.000,00	5.554.390.936,00	78,07%
4. 1. 2. 02. 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.550.000,00	221.554.000,00	29,84%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	60.000.000,00	60,00%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Kominfo/RPK.FM)	50.000.000,00	8.944.000,00	17,89%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Angkutan Bus Daerah)	100.000.000,00	0,00	0,00%
	- Sewa Mess Pemda di Jakarta		0,00	#DIV/0!
	- Sewa Mess Pemda di Makassar		0,00	#DIV/0!
	- Stone Cracer		0,00	#DIV/0!
	- Laboratorium	492.550.000,00	41.550.000,00	8,44%
	- Motor Grader		3.600.000,00	#DIV/0!
	- Loader		20.960.000,00	#DIV/0!
	- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)		50.600.000,00	#DIV/0!
	- Dump Truck		3.000.000,00	#DIV/0!
	- Excavator		20.000.000,00	#DIV/0!
	- Cutter		400.000,00	#DIV/0!
	- Bulldoser		12.500.000,00	#DIV/0!
	- Asphalt Sprayer		0,00	#DIV/0!
	- Tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah		0,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 02. 04	Retribusi Terminal	800.000.000,00	352.360.000,00	44,05%
	- Non Bus	600.000.000,00	290.000.000,00	48,33%
	- Bus	200.000.000,00	62.360.000,00	31,18%
4. 1. 2. 02. 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	152.800.000,00	152,80%
4. 1. 2. 02. 08	Retribusi Rumah Polong Hewan	2.492.450.000,00	2.465.225.000,00	98,91%
	- Kerbau		619.050.000,00	#DIV/0!
	- Babi		1.424.850.000,00	#DIV/0!
	- Sapi		3.000.000,00	#DIV/0!
	- Kuda		0,00	#DIV/0!
	- Rusa		0,00	#DIV/0!
	- Kambing		1.305.000,00	#DIV/0!
	- Pa'piong / amplop		385.830.000,00	#DIV/0!
	- RRPD Dinas Pertanian		31.190.000,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 02. 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000,00	1.454.806.078,00	72,73%
	- Wisatawan Mancanegara		94.584.000,00	#DIV/0!
	- Wisatawan Nusantara		1.252.432.000,00	#DIV/0!
	- Bagi Hasil Pemandian Makula		14.675.478,00	#DIV/0!
	- Pelajar/Anak-anak/Mahasiswa		92.914.600,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 02. 14	Retribusi Sewa Rumah Dinas	50.000.000,00	9.240.000,00	18,48%
4. 1. 2. 02. 15	Retribusi Sewa Kios/Lods	500.000.000,00	207.325.000,00	41,47%
4. 1. 2. 02. 16	Retribusi Pasar Hewan	70.000.000,00	35.222.000,00	50,32%
4. 1. 2. 02. 17	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods	100.000.000,00	426.595.925,00	426,60%
4. 1. 2. 02. 18	Tunggakan Retribusi Sewa Rumah Dinas	10.000.000,00	1.600.000,00	16,00%
4. 1. 2. 02. 19	Tunggakan Retribusi Rumah Polong Hewan Yang Dilakukan Secara Insid	250.000.000,00	196.220.000,00	78,49%
	Tunggakan Retribusi Rumah Polong Hewan (Dinas Pertanian)		20.000,00	#DIV/0!
	Tunggakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		31.112.933,00	#DIV/0!
	Tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 02. 21	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan		530.000,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 03	Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu	935.000.000,00	700.664.256,00	74,94%
4. 1. 2. 03. 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000,00	518.009.200,00	94,18%
	- Bangunan Permanen		510.009.200,00	#DIV/0!
	- Bangunan Semi Permanen		0,00	#DIV/0!
	- Bangunan Tower		8.000.000,00	#DIV/0!
4. 1. 2. 03. 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	450.000,00	4,50%
4. 1. 2. 03. 03	Retribusi Izin Gangguan	170.000.000,00	125.940.056,00	74,08%
4. 1. 2. 03. 04	Retribusi Izin Trayek	205.000.000,00	56.265.000,00	27,45%
	- Retribusi Izin Trayek (Dinas Penanaman Modal & PTSP)	5.000.000,00	0,00	0,00%
	- Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	100.000.000,00	47.945.000,00	47,95%
	- Retribusi Izin Perubahan Status Kendaraan	50.000.000,00	4.500.000,00	9,00%
	- Izin Insidentil dalam Kabupaten	50.000.000,00	3.820.000,00	7,64%

Lampiran 18 :

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
SAMPAI 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI			%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.700.000.000,00	79.116.203.799,89	27.034.696.819,05	106.108.442.618,94	57,45
A	PAJAK DAERAH	15.750.000.000,00	8.227.953.813,00	1.060.381.864,00	9.288.335.677,00	58,97
1	Pajak Hotel	435.000.000,00	371.838.806,00	100.000,00	371.938.806,00	85,50
-	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	125.980.870,00	-	125.980.870,00	125,98
-	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	87.374.600,00	-	87.374.600,00	174,75
-	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	11.614.680,00	-	11.614.680,00	23,23
-	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	16.946.000,00	-	16.946.000,00	33,89
-	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	5.219.500,00	100.000,00	5.319.500,00	10,64
-	Tunggakan Pajak Hotel	135.000.000,00	124.703.156,00	-	124.703.156,00	92,37
2	Pajak Restoran	625.000.000,00	360.544.330,00	21.974.800,00	382.519.130,00	61,20
-	Restoran	255.000.000,00	206.461.872,00	800,00	206.462.672,00	80,97
-	Rumah Makan	100.000.000,00	55.080.000,00	21.974.000,00	77.054.000,00	77,05
-	Café	50.000.000,00	10.761.500,00	-	10.761.500,00	21,52
-	Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	80.105.458,00	-	80.105.458,00	53,40
-	Tunggakan Pajak Kafe	50.000.000,00	5.562.500,00	-	5.562.500,00	11,13
-	Tunggakan Rumah Makan	20.000.000,00	2.573.000,00	-	2.573.000,00	12,87
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	11,50
-	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	-	-	-	-
-	Permalinan Ketangkasan	10.000.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	23,00
4	Pajak Reklame	3.123.000.000,00	536.361.063,00	34.962.844,00	571.323.907,00	18,29
-	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.986.500.000,00	86.226.919,00	22.542.656,00	108.769.575,00	3,64
-	Pajak Reklame Kalin	76.500.000,00	392.746.275,00	12.420.188,00	405.166.463,00	529,63
-	Tunggakan Pajak Reklame	60.000.000,00	57.387.869,00	-	57.387.869,00	95,65
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000,00	4.073.713.017,00	383.602.074,00	4.457.315.091,00	89,15
6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	3.522.000.000,00	464.810.804,00	453.559.411,00	918.370.215,00	26,08
-	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	3.000.000.000,00	460.044.494,00	450.585.811,00	910.630.305,00	30,35
-	Mineral Bukan Logam & Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	2.664.000,00	2.973.600,00	5.637.600,00	1,08
-	Tunggakan Mineral Bukan Logam & Batuan Yg Dipungut Dgn Karcis	2.000.000,00	2.102.310,00	-	2.102.310,00	105,12
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan	2.525.000.000,00	1.891.073.941,00	135.870.985,00	2.026.944.926,00	80,28
-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	1.872.395.756,00	135.870.985,00	2.008.266.741,00	80,33
-	Tunggakan Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan	25.000.000,00	18.678.185,00	-	18.678.185,00	74,71
8	Pajak BPHTB	500.000.000,00	527.311.852,00	30.311.750,00	557.623.602,00	111,52
B	RETRIBUSI DAERAH	18.250.000.000,00	8.712.336.217,00	1.705.945.154,00	10.418.281.371,00	57,09
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	500.000.000,00	441.244.800,00	325.130.300,00	766.375.100,00	153,28
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	91.000.000,00	28.095.000,00	119.095.000,00	79,40
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	600.000.000,00	347.125.000,00	98.300.000,00	445.425.000,00	74,24
4	Retribusi Pelayanan Pasar	700.000.000,00	363.953.000,00	46.824.000,00	410.777.000,00	58,68
5	Tunggakan Retribusi Pasar	9.000.000,00	9.080.000,00	-	9.080.000,00	-
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	91.259.000,00	7.598.500,00	98.857.500,00	65,91
7	Retribusi Penyediaan dan Penedyotan Kakus	50.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	6,00
8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	240.000.000,00	107.886.080,00	22.661.760,00	130.547.840,00	54,39
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	229.950.000,00	-	229.950.000,00	229,95
-	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - BAPENDA	50.000.000,00	-	-	-	-
-	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - PERHUBUNGAN	100.000.000,00	138.900.000,00	26.250.000,00	165.150.000,00	165,15
-	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - SETDA	492.550.000,00	134.415.000,00	12.400.000,00	146.815.000,00	29,81
-	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - PUPR	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
-	Tunggakan Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - SETDA	800.000.000,00	315.590.000,00	38.660.000,00	354.250.000,00	44,28
10	Retribusi Terminal	100.000.000,00	182.325.000,00	30.675.000,00	213.000.000,00	213,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.452.650.000,00	1.706.900.000,00	683.275.000,00	2.390.175.000,00	53,68
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.800.000,00	29.600.000,00	3.060.000,00	32.660.000,00	50,40
-	Retribusi Rumah Potong Hewan - BAPENDA	7.865.350.000,00	3.190.267.800,00	310.810.000,00	3.501.077.800,00	44,51
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000,00	5.230.000,00	1.070.000,00	6.300.000,00	12,60
14	Retribusi Sewa Rumah Dinas	510.000.000,00	181.802.900,00	35.747.000,00	217.549.900,00	42,66
15	Retribusi Sewa Kios/Lods	70.000.000,00	28.710.000,00	4.230.000,00	32.940.000,00	47,06
16	Retribusi Pasar Hewan	650.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-
-	Tunggakan Retribusi Pasar Hewan	100.000.000,00	151.133.500,00	378.000,00	151.511.500,00	151,51
17	Tunggakan Retribusi Sewa Kios/Lods	10.000.000,00	4.560.000,00	1.200.000,00	5.760.000,00	57,60
18	Tunggakan Retribusi Sewa Rumah Dinas	250.000.000,00	202.825.000,00	-	202.825.000,00	81,13
19	Tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan Yang Dilakukan Secara Insidentil	550.000.000,00	659.226.637,00	27.208.594,00	686.435.231,00	124,81
20	Retribusi Isin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	450.000,00	-	450.000,00	4,50
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	170.000.000,00	25.149.500,00	-	25.149.500,00	14,79
22	Retribusi Izin Gangguan	5.000.000,00	-	-	-	-
23	Retribusi Izin Trayek	100.000.000,00	54.093.000,00	2.372.000,00	56.465.000,00	56,47
-	Retribusi Izin Trayek pada DPM & PTSP	-	-	-	-	-
-	Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	11.500.000.000,00	6.084.937.047,00	-	6.084.937.047,00	52,91
1	BUMD Bank Sulselbar	11.500.000.000,00	6.084.937.047,00	-	6.084.937.047,00	52,91
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH	139.200.000.000,00	56.090.976.722,89	24.268.369.801,05	80.316.888.523,94	57,70
1	Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai	2.983.150.000,00	-	-	-	-
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Tiga	-	9.450.000,00	-	9.450.000,00	-

Lampiran 19 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PENDAPATAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Sem. I	Jumlah Sem. II	Jumlah Total	(%)
1	2	3	4	11	12	13
4.	PENDAPATAN	1.328.335.248.000,00	536.317.342.927,11	654.495.086.385,97	1.190.812.429.313,08	89,65%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.752.107.000,00	53.020.336.205,29	66.443.832.136,26	119.464.168.341,55	63,63%
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	13.000.000.000,00	4.251.264.333,00	8.115.186.512,00	12.366.450.845,00	95,13%
4.1.1.01.	Pajak Hotel	435.000.000,00	137.057.460,00	255.133.555,00	392.191.015,00	90,16%
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	-	109.993.085,00	109.993.085,00	109,99%
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	28.451.000,00	76.165.100,00	104.616.100,00	209,23%
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	2.001.040,00	32.033.700,00	34.034.740,00	68,07%
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	3.967.500,00	19.633.100,00	23.602.600,00	47,21%
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	1.435.000,00	2.544.070,00	3.979.070,00	7,96%
4.1.1.01.15.	Tunggakan Pajak Hotel	135.000.000,00	101.202.920,00	14.762.500,00	115.965.420,00	85,90%
4.1.1.02.	Pajak Restoran	625.000.000,00	144.450.865,00	316.413.285,00	460.864.150,00	73,74%
4.1.1.02.01.	Restoran	255.000.000,00	17.314.965,00	247.260.195,00	264.575.160,00	103,75%
	- Restoran Hotel Sahid	-	-	82.784.844,00	82.784.844,00	-
	- Restoran Hotel Sangalla	-	-	33.618.460,00	44.561.425,00	-
	- Restoran Hotel Pantan Toraja	-	10.942.965,00	29.934.600,00	34.220.300,00	-
	- Restoran Puri Artha	-	4.285.700,00	-	-	-
	- Restoran Banupapan	-	-	-	-	-
	- Restoran Makula	-	-	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Panorama	-	-	1.434.500,00	1.434.500,00	-
	- Restoran Rumah Makan Idaman	-	-	8.329.500,00	8.329.500,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cafe Botang	-	-	1.837.400,00	1.837.400,00	-
	- Restoran Rumah Makan Irvan	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-
	- Restoran Rumah Makan Criso	-	-	-	-	-
	- Restoran Bambu	-	-	-	-	-
	- Restoran Depot 99	-	-	2.439.800,00	2.439.800,00	-
	- Restoran Kampung Wisata	-	675.000,00	981.000,00	1.656.000,00	-
	- Restoran Lesitan Putri	-	-	-	-	-
	- Restoran KFC	-	600.700,00	1.852.000,00	2.452.700,00	-
	- Restoran Bukit Indah Rintho Jaya	-	-	-	-	-
	- Restoran Rumah Makan Cathering	-	-	35.739.400,00	35.739.400,00	-
	- Restoran Rumah Makan Kawanan	-	-	5.798.100,00	5.798.100,00	-
	- Restoran Rumah Makan Mie Eline	-	-	11.374.602,00	11.374.602,00	-
	- Restoran Fearly Cafe	-	810.600,00	6.334.100,00	7.144.700,00	-
	- Restoran Artha Food	-	-	4.016.831,00	4.016.831,00	-
	- Restoran Warung Amel Kitchen	-	-	2.605.400,00	2.605.400,00	-
	- Restoran Warung Makan Laras	-	-	1.162.300,00	1.162.300,00	-
	- Restoran Warung Mnyar	-	-	1.240.800,00	1.240.800,00	-
	- Restoran Warung Wong Solo	-	-	725.900,00	725.900,00	-
	- Restoran Warung Sahar Solo	-	-	3.532.600,00	3.532.600,00	-
	- Restoran Rumah Makan Almas Pantan	-	-	2.288.900,00	2.288.900,00	-
	- Restoran Rumah Makan Cabang Almas Pantan	-	-	665.000,00	665.000,00	-
	- Restoran Warung Sunan Dirajat	-	-	2.122.900,00	2.122.900,00	-
	- Restoran Warung Pojok	-	-	775.700,00	775.700,00	-
	- Restoran Rumah Makan Mitra Patma	-	-	2.965.558,00	2.965.558,00	-
	- Restoran Duli-Buli	-	-	-	-	-
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	100.000.000,00	29.142.000,00	43.746.000,00	72.888.000,00	#DIV/0!
4.1.1.02.03.	Cafe	50.000.000,00	4.014.000,00	6.395.000,00	10.409.000,00	20,82%
4.1.1.02.09.	Tunggakan Pajak Restoran	150.000.000,00	85.461.900,00	7.895.590,00	93.357.490,00	62,24%
4.1.1.02.10.	Tunggakan Pajak Kafetaria/Karaoke	50.000.000,00	6.078.000,00	2.706.500,00	8.784.500,00	17,57%
4.1.1.02.11.	Tunggakan Pajak Rumah Makan	20.000.000,00	2.440.000,00	8.410.000,00	10.850.000,00	54,25%
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000,00	-	13.052.500,00	13.052.500,00	65,26%
4.1.1.03.07.	Karaoke	7.000.000,00	-	12.184.500,00	12.184.500,00	-
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	-	-	-	0,00%
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	-	868.000,00	868.000,00	17,36%
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.635.000.000,00	210.457.676,00	292.986.827,00	503.444.503,00	30,79%
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000.000,00	45.499.125,00	120.598.581,00	166.097.706,00	11,07%
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	75.000.000,00	151.190.676,00	162.391.871,00	313.582.547,00	418,11%
4.1.1.04.11.	Tunggakan Pajak Reklame	60.000.000,00	13.767.875,00	9.996.375,00	23.764.250,00	39,61%

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Sem. I	Jumlah Sem. II	Jumlah Total	(%)
1	2	3	4	11	12	13
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	5.238.000.000,00	2.392.271.345,00	2.444.567.789,00	4.836.839.134,00	92,34%
4.1.1.05.01	Penerangan Jalan Sumber PLN	5.238.000.000,00	2.392.271.345,00	2.444.567.789,00	4.836.839.134,00	92,34%
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.022.000.000,00	652.009.774,00	1.164.809.140,00	1.816.818.914,00	89,85%
4.1.1.11.12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.500.000.000,00	4.194.104,00	1.161.552.420,00	1.165.746.524,00	77,72%
4.1.1.11.13	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	520.000.000,00	11.653.500,00	-	11.653.500,00	2,24%
4.1.1.11.16	Tunggakan Pajak Tambang Galian Gelongan C	2.000.000,00	636.162.170,00	3.256.720,00	639.418.890,00	###
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.525.000.000,00	216.124.128,00	2.651.374.516,00	2.867.498.644,00	113,56%
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	197.346.406,00	2.651.177.141,00	2.848.523.547,00	113,94%
4.1.1.12.02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	18.777.722,00	197.375,00	18.975.097,00	75,90%
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000,00	498.893.085,00	976.848.900,00	1.475.741.985,00	295,15%
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	500.000.000,00	498.893.085,00	976.848.900,00	1.475.741.985,00	295,15%
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.000.000.000,00	5.399.237.944,50	7.404.473.482,50	12.803.711.427,00	75,32%
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.190.000.000,00	737.726.940,00	1.354.697.160,00	2.092.424.100,00	95,54%
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	500.000.000,00	296.069.800,00	474.070.400,00	770.090.200,00	154,02%
	- Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan Kualitas Air)	-	-	16.362.400,00	16.362.400,00	-
	- Jasa Sarana Puskesmas	-	35.422.550,00	61.077.500,00	96.500.050,00	-
	- Jasa Pelayanan Puskesmas	-	30.251.250,00	49.482.500,00	79.733.750,00	-
	- Pelayanan Kesehatan (Jasa Pelayanan Non Kapitasi)	-	230.396.000,00	347.098.000,00	577.494.000,00	-
	- Tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	35.500.000,00	91.535.000,00	127.035.000,00	84,69%
	- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	35.500.000,00	91.535.000,00	127.035.000,00	84,69%
	- Tunggakan Persampahan	-	-	-	-	-
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	161.646.000,00	248.304.000,00	409.950.000,00	68,33%
	- Tunggakan Retribusi Jasa Umum (Perhubungan)	-	-	-	-	-
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	186.745.000,00	280.013.000,00	466.758.000,00	93,35%
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	36.476.500,00	76.547.000,00	113.023.500,00	75,35%
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/stau Penyediaan Kaku	40.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	5,00%
4.1.2.01.13	Pengendalian Menara Telekomunikasi	209.000.000,00	15.936.640,00	153.754.240,00	169.690.880,00	81,19%
4.1.2.01.15	Tunggakan Retribusi Pasar	10.000.000,00	3.353.000,00	-	3.353.000,00	33,53%
4.1.2.01.16	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.000.000,00	-	30.523.520,00	30.523.520,00	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	13.974.000.000,00	4.393.200.802,00	5.596.698.280,00	9.989.899.082,00	71,49%
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.550.000,00	86.260.000,00	385.375.000,00	471.635.000,00	63,52%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Bapenda)	100.000.000,00	30.660.000,00	271.980.000,00	302.640.000,00	302,64%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	50.000.000,00	-	45.000.000,00	84.900.000,00	84,90%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	100.000.000,00	39.900.000,00	68.395.000,00	84.095.000,00	17,07%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (PUPR):	492.550.000,00	15.700.000,00	-	-	-
	- Stone Craicer	-	6.450.000,00	36.250.000,00	42.700.000,00	-
	- Laboratorium	-	-	-	-	-
	- Motor Grader	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	- Loader	-	8.000.000,00	28.545.000,00	36.545.000,00	-
	- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)	-	-	-	-	-
	- Dump Truck	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	- Excavator	-	250.000,00	-	250.000,00	-
	- Cutter	-	-	-	-	-
	- Bulldoser	-	-	-	-	-
	- Core Drill	-	-	-	-	-

Lampiran 20 :

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN PENDAPATAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				(%)
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN	1.169.018.453.000,00	1.067.270.644.114,71	8.931.427.880,03	1.076.202.071.994,74	92,06%	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.539.974.000,00	97.935.505.655,15	4.461.590.999,03	102.397.096.654,18	81,55%	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.000.000.000,00	9.714.791.347,50	1.263.069.021,00	10.977.830.368,50	99,80%	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	500.000.000,00	250.614.997,00	25.379.208,00	275.994.205,00	55,20%	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	150.000.000,00	27.116.622,00	20.976.208,00	47.792.830,00	31,86%	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	180.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2,78%	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	50.000.000,00	51.592.908,00	4.433.000,00	56.025.908,00	112,65%	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	12.504.500,00	-	12.504.500,00	25,01%	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	20.000.000,00	1.030.305,00	270.000,00	1.300.305,00	6,50%	
4.1.1.01.15	Tunggakan Pajak Hotel	50.000.000,00	153.370.662,00	-	153.370.662,00	306,74%	
4.1.1.02.	Pajak Restoran	450.000.000,00	289.929.467,00	18.855.698,00	308.785.165,00	68,57%	
4.1.1.02.01	Restoran	270.000.000,00	125.188.522,00	16.635.698,00	141.824.220,00	52,53%	
	Restoran	75.000.000,00	34.614.813,00	4.515.368,00	39.130.211,00		
	- Restoran Hotel Sahid	25.000.000,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Hotel Sangalla	30.000.000,00	843.000,00	-	843.000,00		
	- Restoran Hotel Pantan Toraja	85.000.000,00	24.848.600,00	7.365.300,00	32.213.900,00		
	- Restoran Puri Artha	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Batupapan	200.778,00	200.778,00	-	200.778,00		
	- Restoran Makia'	25.000.000,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Rumah Makan Panoroma	25.000.000,00	3.369.400,00	-	3.369.400,00		
	- Restoran Rumah Makan Ikmam	291.600,00	291.600,00	-	291.600,00		
	- Restoran Rumah Makan Cafe Botang	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Rumah Makan Invan	340.600,00	340.600,00	-	340.600,00		
	- Restoran Yameke	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Rumah Makan Cristo	5.000.000,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Bambu	218.200,00	218.200,00	-	218.200,00		
	- Restoran Depot 99	337.500,00	337.500,00	-	337.500,00		
	- Restoran Kampung Wisata	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Lesahan Putei	793.900,00	793.900,00	-	793.900,00		
	- Restoran WFC	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Bukit Indah Rintoh Jaya	1.020.000,00	1.020.000,00	4.455.000,00	5.475.000,00		
	- Restoran Rumah Makan Cahereng	15.090.700,00	15.090.700,00	-	15.090.700,00		
	- Restoran Rumah Makan Kawana	8.742.125,00	8.742.125,00	-	8.742.125,00		
	- Restoran Rumah Makan Mie Elino	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00		
	- Restoran Fearyly Cafe	3.018.546,00	3.018.546,00	-	3.018.546,00		
	- Restoran Artha Food	4.760.900,00	4.760.900,00	-	4.760.900,00		
	- Restoran Warung Anek Kichen	4.003.700,00	4.003.700,00	-	4.003.700,00		
	- Restoran Warung Makan Laras	2.245.400,00	2.245.400,00	-	2.245.400,00		
	- Restoran Warung Mayar	392.400,00	392.400,00	-	392.400,00		
	- Restoran Warung Wong Solo	3.116.800,00	3.116.800,00	-	3.116.800,00		
	- Restoran Warung Sahar Solo	1.846.800,00	1.846.800,00	-	1.846.800,00		
	- Restoran Rumah Makan Almas Pantan	342.000,00	342.000,00	-	342.000,00		
	- Restoran Rumah Makan Cabang Almas Pantan	2.090.735,00	2.090.735,00	-	2.090.735,00		
	- Restoran Warung Sunan Drajak	5.547.418,00	5.547.418,00	-	5.547.418,00		
	- Restoran Warung Makan Khudisa	915.000,00	915.000,00	-	915.000,00		
	- Restoran Warung Makan Indola	0,00	0,00	-	0,00		
	- Restoran Warung Pojok	1.412.050,00	1.412.050,00	-	1.412.050,00		
	- Restoran Rumah Makan Mitra Palma	283.500,00	283.500,00	-	283.500,00		
	- Restoran Rumah Makan Restu	1.971.000,00	1.971.000,00	-	1.971.000,00		
	- Restoran Rumah Makan Sang Timur	1.236.000,00	1.236.000,00	300.000,00	1.536.000,00		
	- Restoran Rumah Sederhana	1.147.057,00	1.147.057,00	-	1.147.057,00		
	- Restoran Mitra Pantan	0,00	0,00	-	0,00		
4.1.1.02.02	Rumah Makan	110.000.000,00	21.694.000,00	2.020.000,00	23.714.000,00	21,56%	
4.1.1.02.03	Kafe/Bar	30.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	
4.1.1.02.09	Tunggakan Pajak Restoran	30.000.000,00	142.378.945,00	-	142.378.945,00	474,60%	
4.1.1.02.10	Tunggakan Pajak Kafe/Bar/Karaoke	5.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	
4.1.1.02.11	Tunggakan Pajak Rumah Makan	5.000.000,00	668.000,00	-	668.000,00	13,36%	
		25.000.000,00	14.391.300,00	1.634.020,00	16.025.320,00	64,10%	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15.000.000,00	9.499.300,00	1.634.020,00	11.133.320,00	74,22%	
4.1.1.03.07	Karaoke	5.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00%	
4.1.1.03.15	Pemrintan Kelangkaan	5.000.000,00	4.892.000,00	-	4.892.000,00	97,84%	
4.1.1.03.16	Tunggakan Pajak Hiburan	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
4.1.1.04	Pajak Reklame	692.000.000,00	764.081.405,00	5.747.018,00	770.828.423,00	111,38%	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bilboard/Videootron/Megatron	200.000.000,00	216.777.190,00	5.071.218,00	221.848.408,00	110,92%	
4.1.1.04.02	Reklame Kalan	450.000.000,00	519.217.448,00	1.675.800,00	520.893.248,00	115,75%	
4.1.1.04.11	Tunggakan Pajak Reklame	30.000.000,00	28.086.787,00	-	28.086.787,00	93,62%	

4.1.1.05	Pajak Pemukiman Jalan	4.500.000.000,00	4.478.514.176,00	411.070.324,00	4.887.584.500,00	108,61%
4.1.1.05.01	Penerangan Jalan Sumber PLN	4.500.000.000,00	4.478.514.176,00	411.070.324,00	4.887.584.500,00	108,61%
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	950.000.000,00	735.054.468,00	330.297.072,00	1.065.351.540,00	112,14%
4.1.1.11.12	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	800.000.000,00	581.341.014,00	312.346.272,00	893.687.286,00	111,71%
4.1.1.11.13	Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Dipungut Dengan Karcis	50.000.000,00	70.625.400,00	17.950.800,00	88.576.200,00	177,15%
4.1.1.11.16	Tunggakan Pajak Tambang Galian Golongan C	100.000.000,00	83.088.054,00	-	83.088.054,00	83,09%
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.770.000.000,00	2.076.190.890,00	352.453.856,00	2.428.634.736,00	87,88%
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.750.000.000,00	2.046.696.416,00	351.927.333,00	2.398.533.749,00	87,22%
4.1.1.12.02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	29.574.464,00	526.523,00	30.100.987,00	150,50%
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.125.000.000,00	1.107.994.654,50	116.831.825,00	1.224.826.479,50	108,92%
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak	1.125.000.000,00	1.107.994.654,50	116.831.825,00	1.224.826.479,50	108,92%
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	5.256.713.127,75	1.074.753.626,00	6.330.466.753,75	63,30%
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	2.235.250.000,00	1.442.643.827,00	195.436.120,00	1.638.080.047,00	73,28%
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	775.000.000,00	787.332.047,00	81.167.800,00	686.459.847,00	112,00%
	- Jasa Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air	25.000.000,00	0,00	16.532.800,00	16.532.800,00	-
	- Retribusi Puskesmas	150.000.000,00	164.274.500,00	-	164.274.500,00	-
	- Pelayanan Kesehatan (Jasa Pelayanan Non Kapitas)	600.000.000,00	623.057.547,00	64.635.000,00	687.692.547,00	-
	- Tunggakan Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	76.000.000,00	27.820.000,00	62.820.000,00	41,88%
	- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	76.000.000,00	27.820.000,00	62.820.000,00	41,88%
	- Tunggakan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	90.570.000,00	0,00	90.570.000,00	18,11%
	- Tunggakan Retribusi Jasa Umum (Perhubungan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	196.002.000,00	48.754.000,00	244.756.000,00	48,95%
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	129.350.000,00	9.840.000,00	139.200.000,00	139,20%
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.250.000,00	53.750.000,00	25.500.000,00	79.250.000,00	391,36%
4.1.2.01.13	Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000,00	134.170.800,00	2.344.320,00	136.515.200,00	75,84%
4.1.2.01.15	Tunggakan Retribusi Pasar	10.000.000,00	25.469.000,00	0,00	25.469.000,00	254,69%
4.1.2.01.16	Tunggakan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	6.883.750.800,00	2.882.238.825,60	806.516.500,00	3.688.755.425,60	53,59%
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000.000,00	284.240.425,00	61.840.000,00	345.080.425,00	57,68%
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Rapenda)	150.000.000,00	180.000.000,00	45.990.000,00	225.990.000,00	-
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas)	100.000.000,00	41.640.000,00	0,00	41.640.000,00	-
	- Pemakaian Kekayaan Daerah (PLUP):	350.000.000,00	72.600.425,00	5.850.000,00	78.450.425,00	22,41%
	- Stone Cruder	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Laboratorium	41.540.000,00	0,00	2.100.000,00	43.640.000,00	-
	- Motor Grader	0,00	28.354.625,00	0,00	28.354.625,00	-
	- Loader	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Motor Walas (2,5 ton dan 1,5 ton)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Dump Truck	2.130.800,00	0,00	2.130.800,00	2.130.800,00	-
	- Excavator	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	-
	- Ceder	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	-
	- Buldozer	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Core Drill	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	450.000.000,00	91.281.000,00	-	91.281.000,00	20,28%
	- Non Bus	0,00	32.436.000,00	0,00	32.436.000,00	#DIV/0!
	- Bus	250.000.000,00	58.845.000,00	0,00	58.845.000,00	#DIV/0!
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.010.250.000,00	635.455.000,00	714.775.000,00	1.549.230.000,00	28,83%
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.945.250.000,00	626.325.000,00	714.775.000,00	1.549.100.000,00	79,17%
	RPKH (Sapenda)	411.000.000,00	232.750.000,00	165.200.000,00	398.000.000,00	-
	- Kerbau	540.000.000,00	355.425.000,00	385.250.000,00	740.675.000,00	-
	- Sapi	2.000.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	-
	- Kambing	992.450.000,00	231.625.000,00	163.125.000,00	394.650.000,00	-
	- Paipong / Amplop	65.000.000,00	10.130.000,00	0,00	10.130.000,00	15,58%
	RPKH (Dinas Pertanian)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi	2.630.000.000,00	922.561.600,00	35.830.000,00	958.391.600,00	36,45%
	- Objek Wisata Buraka	0,00	639.250.000,00	0,00	639.250.000,00	-
	- Objek Wisata Pango-Pango	0,00	249.240.000,00	34.830.000,00	284.070.000,00	-
	- Objek Wisata Pasar Seni	5.742.500,00	0,00	0,00	5.742.500,00	-
	- Objek Wisata Tianggorog	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	- Objek Wisata Lemo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Objek Wisata Karuaya Bebo'	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	-
	- Objek Wisata Kambira	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Objek Wisata Susya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Objek Wisata Tampang Ajo	28.225.000,00	0,00	0,00	28.225.000,00	-
	- Objek Wisata Makula'	0,00	0,00	0,00	0,00	-